



LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(P E R A K I M)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

NERACA

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Hal.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	6
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR TARGET KINERJA....	7
2.1 Kebijakan Keuangan	7
2.2 Indikator Target Kinerja.....	8
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan..	10
3.2. Faktor Penunjang, Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan yang Telah Ditetapkan.....	12
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD	13
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	14
4.3.Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	14
4.4.Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan	20

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1.PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	23
5.2.PENJELASAN ATAS NERACA.....	32
5.3. PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL.....	46
5.4. PENJELASAN ATAS LPE.....	56

BAB VI PENUTUP

6.1. INFORMASI NON KEUANGAN	58
-----------------------------------	----

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.2. KESIMPULAN DAN SARAN	59
---------------------------------	----





Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Jalan Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi. MS, SH
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36511

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Kuala Tungkal, 31 Desember 2021

Pengguna Anggaran



SYAFRIN ST
NIP. 19821126 201001 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 Desember 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH			0	
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH			-	
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	-	-	-	
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	-	-	-	
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER			-	
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-	-	
1.2.1.1.	a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	
1.2.1.2.	b. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-	-	
1.2.1.3.	c. Pendapatan Dana Alokasi Umum	-	-	-	
1.2.1.4.	d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus	-	-	-	
1.2.2.	Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya	-	-	-	
1.2.2.1.	a. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	
1.2.2.2.	b. Dana Penyesuaian	-	-	-	
1.2.3.	Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	
1.2.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	
1.2.4.	Bantuan Keuangan	-	-	-	
1.2.4.1.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	-	-	
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			-	
1.3.1.	Pendapatan Hibah	-	-	-	
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	
1.3.4.	Pendapatan Lainnya	-	-	-	
2.	BELANJA DAERAH	97.451.429.579,00	91.490.116.728,86	5.961.312.850,14	93,88
2.1.	BELANJA OPERASI	18.589.201.939,00	16.019.997.074,00	2.569.204.865,00	86,18
2.1.1.	1. Belanja Pegawai	3.173.780.938,00	2.848.973.278,00	324.807.660,00	89,77
2.1.2.	2. Belanja Barang dan Jasa	15.415.421.001,00	13.171.023.796,00	2.244.397.205,00	85,44
2.1.3.	3. Belanja Bunga	-	-	-	
2.1.4.	4. Belanja Subsidi	-	-	-	
2.1.5.	5. Belanja Hibah	-	-	-	



Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2021

2.1.6.	6. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
2.1.7.	7. Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
2.2.	BELANJA MODAL	78.862.227.640,00	75.470.119.654,86	3.392.107.985,14	95,7
2.2.1.	Tanah	0	0	0,00	
2.2.2.	Peralatan dan mesin	14.822.227.640,00	14.574.136.141,81	248.091.498,19	98,33
2.2.3.	Gedung dan Bangunan	11.140.000.000,00	10.641.105.952,84	498.894.047,16	95,52
2.2.4.	Jalan, irigasi dan jaringan	52.900.000.000,00	50.254.877.560,21	2.645.122.439,79	95,00
2.2.5.	Aset Tetap lainnya	-	-	0,00	
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA			0,00	
2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	-	-	0,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	97.451.429.579,00	91.490.116.728,86	5.961.312.850,14	93,88
2.4.	TRANSFER			-	
2.4.1.	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	-	-	-	
2.4.1.1.	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	
2.4.1.2.	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	
2.4.1.3.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	-97.451.429.579,00	-91.490.116.728,86	-5.961.312.850,14	-93,88

Pengguna Anggaran



SYAERUN, ST
NIP. 19821126 201001 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NERACA

PER 31 Desember 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2021	2020
1	2	3
ASET	278.759.714.142,40	221.396.849.113,21
ASET LANCAR	28.678.537,00	33.181.164,67
Beban Dibayar Dimuka	27.782.590,00	30.456.891,67
Beban Jasa Dibayar Dimuka	27.782.590,00	30.456.891,67
Persediaan	895.947,00	2.724.273,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	895.947,00	2.724.273,00
ASET TETAP	278.731.035.605,40	221.363.667.948,54
Tanah	2.450.299.435,00	2.450.299.435,00
Tanah Pengguna Lain	469.000.000,00	469.000.000,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.731.299.435,00	1.731.299.435,00
Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	250.000.000,00	250.000.000,00
Peralatan dan Mesin	4.742.534.791,00	4.619.237.991,00
Alat-Alat Besar Darat	899.420.000,00	899.420.000,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	1.225.820.000,00	1.225.820.000,00
Alat Bengkel Bermesin	12.450.000,00	12.450.000,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	100.725.000,00	100.725.000,00
Alat Ukur	21.351.000,00	19.866.000,00
Alat Pengolahan	12.485.000,00	12.485.000,00
Alat Kantor	347.714.194,00	287.005.194,00
Alat Rumah Tangga	1.239.169.297,00	1.234.510.297,00
Komputer	601.179.500,00	550.728.500,00
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	37.792.800,00	31.800.000,00
Alat Studio	39.868.000,00	39.868.000,00
Peralatan Pemancar	174.760.000,00	174.760.000,00
Unit-Unit Laboratorium	29.800.000,00	29.800.000,00
Gedung dan Bangunan	31.242.972.872,35	24.579.315.619,51
Bangunan Gedung Tempat Kerja	18.776.302.073,15	12.112.644.820,31

**NERACA**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2021

Bangunan Gedung Tempat Tinggal	9.047.100.000,00	9.047.100.000,00
Tugu Peringatan	2.790.257.453,20	2.790.257.453,20
Tugu Titik Kontrol/Pasti	629.313.346,00	629.313.346,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	292.884.831.025,05	221.512.151.123,03
Jalan	211.454.266.529,80	161.931.349.276,18
Jembatan	20.046.061.183,58	13.652.226.942,88
Bangunan Air Irigasi	1.345.269.102,91	1.345.269.102,91
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	3.555.017.406,53	3.095.693.390,66
Alam		
Bangunan Air Bersih/Baku	2.772.042.688,08	2.772.042.688,08
Bangunan Air Kotor	495.742.050,02	-
Instalasi Air Minum Bersih	1.780.000.000,00	1.780.000.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik	3.469.739.550,00	3.469.739.550,00
Instalasi Gardu Listrik	150.051.000,00	150.051.000,00
Jaringan Air Minum	860.757.997,00	860.757.997,00
Jaringan Listrik	46.955.883.517,13	32.455.021.175,32
Konstruksi Dalam Pengerjaan	197.250.000,00	1.074.643.500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan.	197.250.000,00	1.074.643.500,00
Akumulasi Penyusutan	(52.786.852.518,00)	(32.871.979.720,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.573.126.153,00)	(3.112.357.840,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.039.617.361,00)	(1.548.716.187,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(47.174.109.004,00)	(28.210.905.693,00)
JUMLAH ASET	278.759.714.142,40	221.396.849.113,21
KEWAJIBAN	99.924.000,00	-
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	99.924.000,00	-
Utang Belanja	99.924.000,00	-
Utang Belanja Barang dan Jasa	99.924.000,00	-
Utang Jasa Pengawasan Jalan Kota	99.924.000,00	-
		-
JUMLAH KEWAJIBAN	99.924.000,00	-
EKUITAS	278.659.790.142,40	221.396.849.113,21
EKUITAS	278.659.790.142,40	221.396.849.113,21
Ekuitas	278.659.790.142,40	221.396.849.113,21
JUMLAH EKUITAS DANA	278.659.790.142,40	221.396.849.113,21
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	278.659.790.142,40	221.396.849.113,21



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN / PENURUNAN	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN - LO		11.520.156.181,00	-11.520.156.181,00	-100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO		11.520.156.181,00	-11.520.156.181,00	-100,00
Pendapatan Hibah - LO		11.520.156.181,00	-11.520.156.181,00	-100,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO		11.520.156.181,00	-11.520.156.181,00	-100,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO		11.520.156.181,00	-11.520.156.181,00	-100,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO		11.520.156.181,00	-11.520.156.181,00	-100,00
			0,00	0,00
REBAN	33.991.419.826,67	30.568.086.311,66	3.423.333.515,01	11,20
BEBAN OPERASI - LO	33.991.419.826,67	30.399.317.661,66	3.592.102.165,01	11,82
Beban Pegawai - LO	2.641.843.398,00	2.339.049.223,00	302.794.175,00	12,95
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1.513.612.773,00	1.431.501.723,00	82.111.050,00	5,74
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.080.589.360,00	1.039.147.900,00	41.441.460,00	3,99
Tunjangan Keluarga - LO	99.306.815,00	111.207.218,00	-11.900.403,00	-10,70
Tunjangan Jabatan - LO	99.080.000,00	104.040.000,00	-4.960.000,00	-4,77
Tunjangan Fungsional - LO	2.560.000,00		2.560.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	29.845.000,00	29.230.000,00	615.000,00	2,10
Tunjangan Beras - LO	72.420.000,00	63.512.340,00	8.907.660,00	14,03
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	349.140,00	37.879,00	311.261,00	821,72
Pembulatan Gaji - LO	14.290,00	14.172,00	118,00	0,83
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	120.562.043,00	75.941.823,00	44.620.220,00	58,76
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) - LO	2.221.498,00	2.092.591,00	128.907,00	6,16
Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) - LO	6.664.627,00	6.277.800,00	386.827,00	6,16
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	906.110.625,00	907.547.500,00	-1.436.875,00	-0,16
Tambahan Penghasilan PNSD - LO	906.110.625,00	907.547.500,00	-1.436.875,00	-0,16
Beban Honorarium Kegiatan - LO	222.120.000,00	0	222.120.000,00	100,00
Beban Honorarium PNS - LO	222.120.000,00	0	222.120.000,00	100,00
Beban Honorarium Non PNS - LO		0	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	11.567.208.503,67	11.466.320.522,66	100.887.981,01	0,88
Beban Bahan Pakai Habis	1.423.269.818,00	1.338.034.084,00	85.235.734,00	6,37
Beban Persediaan alat tulis kantor	83.248.371,00	94.265.542,00	-11.017.171,00	-11,69
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.246.963.532,00	1.234.067.500,00	12.896.032,00	1,05
Beban Persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya	82.674.726,00	3.330.000,00	79.344.726,00	2382,72



LAPORAN OPERASIONAL
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2021

Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	3.721.042,00	-3.721.042,00	-100,00
Beban Dekorasi	0,00	2.300.000,00	-2.300.000,00	-100,00
Beban Publikasi	0,00	350.000,00	-350.000,00	-100,00
Beban Perlengkapan Gedung Kantor	10.383.189,00		10.383.189,00	100,00
Beban Persediaan Bahan/ Material	1.210.000,00	199.880.000,00	-198.670.000,00	-99,39
Beban Persediaan bahan baku bangunan	1.210.000,00		1.210.000,00	100,00
Beban Persediaan bahan/bibit tanaman	0,00	199.880.000,00	-199.880.000,00	-100,00
Beban Jasa Kantor	7.248.677.239,00	6.145.886.216,00	1.102.791.023,00	17,94
Beban Jasa listrik		5.951.222.016,00	-5.951.222.016,00	-100,00
Beban Jasa surat kabar/majalah		7.200.000,00	-7.200.000,00	-100,00
Beban Jasa paket/pengiriman		64.200,00	-64.200,00	-100,00
Beban Jasa Kerja	6.909.470.525,00	185.300.000,00	6.724.170.525,00	3628,80
Beban Transportasi dan Akomodasi		2.100.000,00	-2.100.000,00	-100,00
Belanja Jasa Kebersihan	263.600.000,00		263.600.000,00	100,00
Belanja Jasa Iuran	40.256.714,00		40.256.714,00	100,00
Belanja Jasa Penyusunan Data	35.350.000,00		35.350.000,00	100,00
Beban Premi Asuransi	18.024.301,67	96.577.007,66	-78.552.705,99	-81,34
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	0,00	53.578.816,00	-53.578.816,00	-100,00
DaerahBeban Jasa Premi Asuransi Kendaraan Milik	2.674.301,67	42.998.191,66	-40.323.889,99	-93,78
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	15.350.000,00		15.350.000,00	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	145.840.000,00	191.317.400,00	-45.477.400,00	-23,77
Beban Jasa Service		28.409.000,00	-28.409.000,00	-100,00
Beban Penggantian Suku Cadang	55.455.000,00	62.900.000,00	-7.445.000,00	-11,84
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	90.385.000,00	99.015.000,00	-8.630.000,00	-8,72
Beban Pajak Kendaraan Bermotor		993.400,00	-993.400,00	-100,00
Beban Cetak dan Penggandaan		45.622.921,00	-45.622.921,00	-100,00
Beban Cetak		36.743.671,00	-36.743.671,00	-100,00
Beban Penggandaan		8.879.250,00	-8.879.250,00	-100,00
Beban Makanan dan Minuman	49.568.000,00	25.497.000,00	24.071.000,00	94,41
Beban makanan dan minuman rapat	49.568.000,00	25.497.000,00	24.071.000,00	94,41
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	24.997.500,00	34.278.750,00	-9.281.250,00	-27,08
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)		16.335.000,00	-16.335.000,00	-100,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	24.997.500,00	17.943.750,00	7.053.750,00	39,31
Belanja Pakaian Kerja		11.588.500,00	-11.588.500,00	-100,00
Beban pakaian kerja lapangan		11.588.500,00	-11.588.500,00	-100,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu		29.111.500,00	-29.111.500,00	-100,00
Beban pakaian olahraga		29.111.500,00	-29.111.500,00	-100,00
Beban Perjalanan Dinas	235.582.195,00	431.807.144,00	-196.224.949,00	-45,44
Beban perjalanan dinas dalam daerah	235.582.195,00	264.729.746,00	-29.147.551,00	-11,01
Beban perjalanan dinas luar daerah		167.077.398,00	-167.077.398,00	-100,00



LAPORAN OPERASIONAL
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2021

Beban Pemeliharaan	109.198.000,00	39.780.000,00	69.418.000,00	174,50
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	63.355.000,00	39.780.000,00	23.575.000,00	59,26
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	45.843.000,00		45.843.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultasi	2.055.741.450,00	2.154.115.000,00	-98.373.550,00	-4,57
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	791.079.150,00	2.114.240.000,00	-1.323.160.850,00	-62,58
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	1.264.662.300,00	39.875.000,00	1.224.787.300,00	3071,57
Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	0	30.000.000,00	100,00
Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	30.000.000,00	0	30.000.000,00	100,00
Honorarium PNS	214.700.000,00	440.025.000,00	-225.325.000,00	-51,21
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	214.700.000,00	440.025.000,00	-225.325.000,00	-51,21
Honorarium Non PNS	10.400.000,00	282.800.000,00	-272.400.000,00	-96,32
Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	10.400.000,00	282.800.000,00	-272.400.000,00	-96,32
Beban Penyusutan dan Amortisasi	19.779.040.925,00	16.593.947.916,00	3.185.093.009,00	19,19
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	460.768.313,00	522.050.828,00	-61.282.515,00	-11,74
Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	89.942.000,00	89.942.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor		46.771.428,00	-46.771.428,00	-100,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	5.995.000,00	5.995.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Ukur	3.973.200,00	3.973.200,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian	3.121.250,00	3.121.250,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Kantor	54.163.686,00	37.738.554,00	16.425.132,00	43,52
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	188.124.092,00	183.318.437,00	4.805.655,00	2,62
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	87.623.292,00	118.069.459,00	-30.446.167,00	-25,79
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	99.876,00		99.876,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Studio	5.279.917,00	11.738.500,00	-6.458.583,00	-55,02
Beban Penyusutan Alat Komunikasi		3.993.000,00	-3.993.000,00	-100,00
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	17.476.000,00	100.000,00	17.376.000,00	17376,00
Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	3.725.000,00	3.725.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralengkapan Non Senjata Api	0,00	12.320.000,00	-12.320.000,00	-100,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	490.901.174,00	970.984.002,00	-480.082.828,00	-49,44
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	223.446.244,00	216.448.192,00	6.998.052,00	3,23
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	199.063.515,00	723.768.000,00	-524.704.485,00	-72,50
Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah		0	0,00	0,00
Beban Penyusutan Tugu Peringatan	55.805.148,00	18.181.542,00	37.623.606,00	206,93
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	12.586.267,00	12.586.268,00	-1,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18.827.371.438,00	15.100.913.086,00	3.726.458.352,00	24,68
Beban Penyusutan Jalan	17.084.794.487,00	13.521.593.920,00	3.563.200.567,00	26,35
Beban Penyusutan Jembatan	289.495.650,00	247.939.464,00	41.556.186,00	16,76
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	26.905.382,00	22.489.432,00	4.415.950,00	19,64
Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	313.700.533,00	275.541.404,00	38.159.129,00	13,85



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	221.396.997.306,21	183.023.360.504,83
RK PPKD	91.490.116.728,86	57.827.401.158,04
Surplus/Defisit - LO	(33.991.419.826,67)	(19.047.930.130,66)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(135.831.873,00)	(405.834.226,00)
JUMLAH EKUITAS AKHIR	278.759.714.142,40	221.396.997.306,21



Pengguna Anggaran

SYAFRUN, ST

NIP. 19821126 201001 1 015



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 pada hakikatnya merupakan perwujudan kewajiban SKPD kepada masyarakat atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (SAP, 2010): antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam periode pelaporan, yang menyajikan seluruh Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Dinas



Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar Generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 juga menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna untuk menilai akuntabilitas dan untuk mengetahui berbagai informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban. Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat;



3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi pengguna anggaran sesuai anggaran yang telah disediakan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendanai aktivitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendanai aktivitas pemerintahan dan pembangunan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4574);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4616);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 15);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari tujuh bab yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II. Kebijakan Keuangan dan pencapaian Target Kinerja APBD :

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan yang telah Ditetapkan

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD.
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD.

Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan atas Neraca
- 5.3. Penjelasan atas Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI. Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab VII. Penutup



BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN

DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Kebijakan Keuangan

Sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2021, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021, dan menetapkan kebijakan keuangan terkait Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Kebijakan ini sekaligus menjadi target kinerja keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang harus dipedomani oleh seluruh pihak yang terkait dengan keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah pada tahun 2021 juga dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai entitas akuntansi, meliputi hal hal sebagai berikut:

- a) Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
- b) Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.



- c) Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Adapun kebijakan alokasi anggaran Belanja Tahun Anggaran 2021 untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebesar Rp97.451.429.579,00.

Rincian anggaran belanja berdasarkan jenis belanja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Belanja Berdasarkan Jenis Belanja

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik/(Turun)	%
1.	Belanja Pegawai	3.173.780.938,00	3.236.458.200,00	-62.677.262,00	-1,94
2.	Belanja Barang dan Jasa	15.415.421.001,00	13.287.910.279,00	2.127.510.722,00	16,01
3.	Belanja Tanah			0,00	
4.	Belanja Peralatan dan Mesin	14.822.227.640,00	33.500.000,00	14.788.727.640,00	44145,46
5.	Belanja Gedung dan Bangunan	11.140.000.000,00	3.545.700.000,00	7.594.300.000,00	214,18
6.	Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	52.900.000.000,00	41.812.550.000,00	11.087.450.000,00	26,52
7.	Belanja Aset tetap lainnya			0,00	
	Jumlah	97.451.429.579,00	61.916.118.479,00	35.535.311.100,00	57,39

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp97.451.429.579,00 yang berarti target Belanja Tahun Anggaran 2021 Naik 57.39% dibandingkan anggaran Belanja Tahun Anggaran 2020 yang berjumlah Rp61.916.118.479,00.

2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja.

Perencanaan kinerja merupakan aktifitas pengambilan keputusan ke depan tentang tingkat capaian kinerja yang diharapkan untuk dicapai yang dijabarkan dalam pelaksanaan program-kegiatan pada satu tahun anggaran. Perencanaan kinerja ini akan menjembatani antara rencana strategis yang telah disusun dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan Rencana Akuntabilitas Kinerja setiap tahun.

Untuk program pencapaian target kinerja tahun anggaran 2021, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai 10 program, dimana masing-masing program terdapat beberapa



kegiatan yang mengikutinya. Program-program APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Program pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
- f. Program Pengembangan Perumahan ;
- g. Program Peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas ;
- h. Program pengembangan data dan informasi ;
- i. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman ;
- j. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 Alokasi dana APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp97.451.429.579,00,- yang digunakan membiayai belanja langsung (Gaji dan Tunjangan pegawai, dan Tambahan Penghasilan PNS) dan 30 kegiatan belanja langsung sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Belanja Langsung

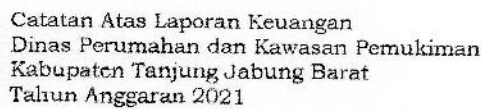
No.	Jenis Belanja	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
1.	BELANJA OPERASI	18.589.201.939,00	16.019.997.074,00	86,18
2.	BELANJA MODAL	78.862.227.640,00	75.470.119.654,86	95,70
Jumlah		97.451.429.579,00	91.490.116.728,86	93,88

3.2. Faktor Penunjang, Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan yang Telah Ditetapkan

Secara umum tidak terdapat hambatan dalam pencapaian target kinerja keuangan, kinerja pendapatan maupun dari kinerja belanja.

faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;



- Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Entitas Pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Entitas Akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan uraian sebagai berikut :

1. Basis Akrual

Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) disusun dengan Basis Akrual Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi akuntansi dan peristiwa lainnya pada saat



transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat adanya kewajiban yang harus ditanggung oleh pemerintah atas suatu kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional (LO).

2. Basis Kas

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi akuntansi pada saat adanya pengaruh terhadap jumlah kas yang dimiliki. Laporan Keuangan yang disusun dengan basis kas adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), dan Laporan Arus Kas (LAK).

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengukuran Belanja

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai yang dikeluarkan secara nyata dari Kas.

2. Pengukuran Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, akan tetapi belum disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas yang disajikan dalam neraca Pemerintah Daerah mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing akan dikonversi menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.



3. Pengukuran Persediaan

Persediaan disajikan di neraca dengan nilai sebesar :

- (1) Biaya Perolehan yaitu apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan atas persediaan dengan menggunakan harga satuan pembelian terakhir atas persediaan tersebut.

- (2) Biaya Standar yaitu apabila diperoleh dengan produksi sendiri.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

- (3) Nilai Wajar yaitu apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

4. Pengukuran Aset Tetap

- (1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

- (2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

- (3) Kapitalisasi Aset

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil



pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan
1	Tanah	1,00
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	5.000.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	1.500.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	600.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	500.000,00
	- Alat-alat Rumah Tangga	300.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	1.600.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	1.000.000,00
2.9	Alat Keamanan	1.000.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	10.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	10.000.000,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	10.000.000,00
4.3	Instalasi	10.000.000,00
4.4	Jaringan	10.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	200.000,00
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	500.000,00
	b. Ternak	500.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	500.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	500.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,00



5. Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen aset Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dipergunakan untuk menjalankan pemerintahan. Nilai Aset tetap sangat dipengaruhi oleh masa manfaat dari aset tetap tersebut. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar penilaian akan masa manfaat yang akan diperoleh dapat dianalisis dengan baik dalam rangka pengambilan keputusan atas aset tetap dimaksud. Maka untuk itu nilai aset tetap yang disajikan dalam laporan harus nilai yang wajar agar pengambilan keputusan dapat diambil secara tepat, Untuk mendapatkan nilai yang wajar perlu ditetapkan kebijakan yang tepat terkait dengan penyusutan aset tetap tersebut.

Metode penyusutan yang digunakan untuk mendapatkan nilai yang wajar adalah metode garis lurus (*straight-linemethod*).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

Kodifikasi		Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1 3		ASET TETAP	
1 3 2		Peralatan dan Mesin	
1 3 2 01		Alat-Alat Besar Darat	10
1 3 2 02		Alat-Alat Besar Apung	8
1 3 2 03		Alat-alat Bantu	7
1 3 2 04		Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1 3 2 05		Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1 3 2 06		Alat Angkut Apung Bermotor	10
1 3 2 07		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1 3 2 08		Alat Angkut Bermotor Udara	20
1 3 2 09		Alat Bengkel Bermesin	10
1 3 2 10		Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1 3 2 11		Alat Ukur	5



Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50



Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	03		Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04		Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05		Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06		Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08		Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09		Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10		Bangunan Air	40
1	3	4	11		Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12		Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13		Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15		Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16		Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17		Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18		Instalasi Gas	30
1	3	4	19		Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20		Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21		Jaringan Listrik	40
1	3	4	22		Jaringan Telepon	20
1	3	4	23		Jaringan Gas	30

Selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan Aset Tetap Lainnya seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

6. Pengukuran Utang

- (1) Utang jangka pendek dan hutang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- (2) Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah



daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilainya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

(3) Utang di neraca diklasifikasikan menjadi:

- Utang Jangka Pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.
- Utang Jangka Panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

7. Pengukuran Ekuitas Dana

Pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun aset lancar, aset tetap, aset lainnya, dan kewajiban.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan

1. Kebijakan Akuntansi Keuangan

- 1) Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran/penilaian;
- 2) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
- 3) Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- 4) Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang selaku Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah



menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, serta pada saat anggaran di alokasikan.

2. Kebijakan Akuntansi Belanja

- 1) Kebijakan Akuntansi Belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian, dan pertanggungjawaban;
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi;
- 3) Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan Kelompok, jenis, obyek belanja. Sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 4) Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat surat pertanggungjawaban (SPI) disahkan;
- 5) Kelompok Belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD kerkeanaan;
- 6) Kelompok Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD kerkeanaan;
- 7) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
- 8) Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah;



- 9) Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah;
- 10) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, maka dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya);
- 11) Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya belanja.

3. Kebijakan Akuntansi Aset

- 1) Kebijakan Akuntansi Belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian, dan pengungkapan aset;
- 2) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat. sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, dalam pengertian ini yang dimaksud aset Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut, maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 3) Pengertian Aset adalah seluruh harta Pemerintah Tanjung Jabung Barat yang tercatat dalam laporan keuangan. Aset tersebut meliputi Aset lancar, Aset tetap dan aset lainnya, baik memiliki bukti kepemilikan atau tidak memiliki bukti kepemilikan, dimanfaatkan dan dikuasai pemerintah daerah, atau pihak lain sesuai ketentuan perundang undangan. aset-aset yang dikuasai Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat namun belum didukung dengan bukti kepemilikan formal yang sah, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan



budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, keamanan, dan kelestarian aset, agar semua aset terdaftar dan terawasi;

- 4) Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkap, namun biaya konstruksi, dan pemeliharaan harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran;
- 5) Suatu aset diakui dan tercatat dalam akuntansi apabila aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 6) Semua aset yang tercatat dalam neraca diukur nilainya dengan satuan uang rupiah, jika terdapat aset yang diperoleh dengan mata uang asing harus dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia;
- 7) Nilai Aset ditetapkan sebesar biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas perolehan aset yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 8) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau dinilai wajar untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan yang mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan;
- 9) Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 10) Pengakuan aset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam Laporan Keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam Tahun Anggaran (TA) yang bersangkutan dengan periode pelaporan tahun sebelumnya.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah Ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam satu Periode Pelaporan dibandingkan dengan Periode Pelaporan Tahun sebelumnya.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pertanggal 31 Desember 2021, dibandingkan dengan tahun sebelumnya per 31 Desember 2020.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai pos-pos Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO pada Periode bersangkutan, dan koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas dibandingkan dengan Periode Pelaporan tahun sebelumnya.

5.1. PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber daya, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan unsur-unsur Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran juga menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dan 2020 diuraikan sebagai berikut :



5.1.1 Pendapatan

Pendapatan adalah semua hak daerah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 tidak mempunyai Pendapatan.

5.1.2. Belanja

Belanja adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Realisasi Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp91.490.116.728,86 dibandingkan dengan Anggaran sebesar Rp97.451.429.579,00 dan Realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp57.827.401.158,04 diuraikan per jenis Belanja sebagai berikut :

Tabel 5.1.1 Rincian Belanja

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Naik/(Turun)	%
1	Belanja Operasi	16.019.997.074,00	13.797.101.527,00	2.222.895.547,00	13,88
	Belanja Pegawai	2.848.973.278,00	3.061.874.223,00	-212.900.945,00	-7,47
	Belanja Barang dan Jasa	13.171.023.796,00	10.735.227.304,00	2.435.796.492,00	18,49
2	Belanja Modal	75.470.119.654,86	44.030.299.631,04	31.439.820.023,82	41,66
	Tanah				
	Peralatan dan mesin	14.574.136.141,81	27.335.000,00	14.546.801.141,81	99,81
	Gedung dan Bangunan	10.641.105.952,84	3.461.662.650,00	7.179.443.302,84	67,47
	Jalan, irigasi dan jaringan	50.254.877.560,21	40.541.301.981,04	9.713.575.579,17	19,33
	Aset Tetap lainnya				
	Jumlah	91.490.116.728,86	57.827.401.158,04	33.662.715.570,82	36,79



5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 yang memberi manfaat jangka pendek.

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp16.524.368.479,00 dan sebesar Rp16.019.997.074,00 dan Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp13.797.101.527,00 Naik sebesar Rp2.435.796.492,00 atau 18,49% diuraikan per jenis Belanja sebagai berikut :

Tabel 5.1.2 Belanja Operasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Naik/(Turun)	%
1	Belanja Operasi	16.019.997.074,00	13.797.101.527,00	2.222.895.547,00	13,88
	Belanja Pegawai	2.848.973.278,00	3.061.874.223,00	-212.900.945,00	-7,47
	Belanja Barang dan Jasa	13.171.023.796,00	10.735.227.304,00	2.435.796.492,00	18,49

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah pengeluaran anggaran yang terdiri dari Belanja Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.848.973.278,00 dari anggaran sebesar Rp3.173.780.938,00 dan Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.061.874.223,00 turun sebesar Rp212.900.945,00 atau 7,47%, diuraikan sebagai berikut :



Tabel 5.1.3 Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Naik/(Turun)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.470.692.653,00	1.431.501.723,00	39.190.930,00	2,66
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	906.110.625,00	907.547.500,00	-1.436.875,00	-0,16
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objekif Lainnya ASN	472.170.000,00	722.825.000,00	-250.655.000,00	53,09
TOTAL		2.848.973.278,00	3.061.874.223,00	-212.900.945,00	-7,47

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.171.023.796,00 dari anggaran sebesar Rp15.415.421.001,00 atau 85,44% dari anggaran. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.1.4 Rincian Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
5.1.02.01	Belanja Barang	522.679.001,00	453.965.992,00	68.713.009,00	86,9
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	522.679.001,00	453.965.992,00	68.713.009,00	86,9
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.216.000,00	1.210.000,00	6.000,00	99,5
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	108.630.000,00	90.385.000,00	18.245.000,00	83,2
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	57.500.000,00	55.455.000,00	2.045.000,00	96,4
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	4.070.000,00	-	4.070.000,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.948.424,00	40.632.969,00	315.455,00	99,2
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	44.578.530,00	40.787.076,00	3.791.454,00	91,5
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	90.189.828,00	76.774.726,00	13.415.102,00	85,1
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.990.000,00	5.900.000,00	90.000,00	98,5
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	58.787.910,00	57.872.532,00	915.378,00	98,4
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.383.309,00	10.383.189,00	120	100
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	71.885.000,00	49.568.000,00	22.317.000,00	69
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	28.500.000,00	24.997.500,00	3.502.500,00	87,7
5.1.02.02	Belanja Jasa	14.290.454.000,00	12.372.277.609,00	1.918.176.391,00	86,6
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.761.010.000,00	7.183.470.525,00	1.577.539.475,00	82
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas,	10.400.000,00	10.400.000,00	-	100



**Catatan Atas Laporan Keuangan
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2021**

	Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	50.400.000,00	-	50.400.000,00	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	597.000.000,00	587.000.000,00	10.000.000,00	98,3
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	152.400.000,00	135.400.000,00	17.000.000,00	88,9
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	110.000.000,00	-	110.000.000,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	264.600.000,00	263.600.000,00	1.000.000,00	99,6
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	75.000.000,00	74.400.000,00	600.000,00	99,2
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	350.000,00	350.000,00	-	100
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.100.000,00	6.500.000,00	600.000,00	91,6
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.500.000,00	3.850.000,00	650.000,00	85,6
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.200.000,00	1.066.000,00	134.000,00	88,8
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.368.000.000,00	5.999.457.245,00	1.368.542.755,00	81,4
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	38.460.000,00	21.047.280,00	17.412.720,00	54,7
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	191.444.000,00	98.526.834,00	92.917.166,00	51,5
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	106.872.000,00	42.920.120,00	63.951.880,00	40,2
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	63.072.000,00	40.256.714,00	22.815.286,00	63,8
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	21.500.000,00	15.350.000,00	6.150.000,00	71,4
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.278.000.000,00	5.060.280.250,00	217.719.750,00	95,9
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	3.960.000.000,00	3.795.617.950,00	164.382.050,00	95,9
5.1.02.02.08.0023	RuangBelanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan	1.318.000.000,00	1.264.662.300,00	53.337.700,00	96
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	50
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	50
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	141.750.000,00	109.198.000,00	32.552.000,00	77
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76.750.000,00	63.355.000,00	13.395.000,00	82,6
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.190.000,00	7.110.000,00	80.000,00	98,9
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.500.000,00	1.625.000,00	1.875.000,00	46,4
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	28.000.000,00	26.165.000,00	1.835.000,00	93,5
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	12.000.000,00	4.800.000,00	7.200.000,00	40
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000,00	5.865.000,00	235.000,00	96,2
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.680.000,00	10.950.000,00	730.000,00	93,8
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.280.000,00	6.840.000,00	1.440.000,00	82,6
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65.000.000,00	45.843.000,00	19.157.000,00	70,5
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	65.000.000,00	45.843.000,00	19.157.000,00	70,5



5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	460.538.000,00	235.582.195,00	224.955.805,00	51,2
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	460.538.000,00	235.582.195,00	224.955.805,00	51,2
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	460.538.000,00	235.582.195,00	224.955.805,00	51,2
TOTAL		15.415.421.001,00	13.171.023.796,00	2.244.397.205,00	85,4

5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal tahun 2021 adalah sebesar Rp75.470.119.654,86 dari anggaran sebesar Rp78.862.227.640,00 dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp44.030.299.631,04 Naik sebesar Rp31.439.820.023,82 atau 41.66% diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1.5 Rincian Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Naik/Turun	%
1	Tanah				
2	Peralatan dan mesin	14.574.136.141,81	27.335.000,00	14.546.801.141,81	99,81
3	Gedung dan Bangunan	10.641.105.952,84	3.461.662.650,00	7.179.443.302,84	67,47
4	Jalan, irigasi dan jaringan	50.254.877.560,21	40.541.301.981,04	9.713.575.579,17	19,33
5	Aset Tetap lainnya				
TOTAL		75.470.119.654,86	44.030.299.631,04	31.439.820.023,82	41,66

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Tidak ada Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2021 maupun tahun 2020.

5.1.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 adalah sebesar Rp14.574.136.141,81 dari anggaran sebesar Rp14.822.227.640,00 dibandingkan dengan Realisasi Tahun



Anggaran 2020 sebesar Rp27.335.000,00 turun sebesar Rp14.546.801.141,81 atau 99,81%.

Tabel 5.1.6 Rincian Lengkap Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.822.227.640,00	14.574.136.141,81	248.091.498,19	98,33
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.500.000,00	1.485.000,00	15.000,00	99,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	1.500.000,00	1.485.000,00	15.000,00	99,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	1.500.000,00	1.485.000,00	15.000,00	99,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	21.360.800,00	21.337.800,00	23.000,00	99,89
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	7.360.800,00	7.359.000,00	1.800,00	99,98
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.360.800,00	7.359.000,00	1.800,00	99,98
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	7.986.000,00	14.000,00	99,83
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.000.000,00	7.986.000,00	14.000,00	99,83
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.000.000,00	5.992.800,00	7.200,00	99,88
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	6.000.000,00	5.992.800,00	7.200,00	99,88
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	59.366.840,00	50.451.000,00	8.915.840,00	84,98
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	43.811.000,00	34.936.000,00	8.875.000,00	79,74
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	43.811.000,00	34.936.000,00	8.875.000,00	79,74
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	15.555.840,00	15.515.000,00	40.840,00	99,74
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	9.555.840,00	9.520.000,00	35.840,00	99,62
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.000.000,00	5.995.000,00	5.000,00	99,92



5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	14.740.000.000,00	14.500.862.341,81	239.137.658,19	98,38
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	14.740.000.000,00	14.500.862.341,81	239.137.658,19	98,38
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	14.740.000.000,00	14.500.862.341,81	239.137.658,19	98,38

5.1.2.2.1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2021 adalah sebesar Rp10.641.105.952,84 dari anggaran sebesar Rp11.140.000.000,00 dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.461.662.650,00 turun sebesar Rp7.179.443.302,84 atau 67,47%.

Tabel 5.1.7 Rincian Lengkap Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No. RFK	Urutan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	11.140.000.000,00	10.641.105.952,84	498.894.047,16	95,52
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	11.140.000.000,00	10.641.105.952,84	498.894.047,16	95,52
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	500.000.000,00	299.732.000,00	200.268.000,00	59,95
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	4.800.000.000,00	4.688.938.952,84	111.061.047,16	97,69
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.000.000.000,00	2.873.794.000,00	126.206.000,00	95,79
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.440.000.000,00	2.392.909.000,00	47.091.000,00	98,07
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	400.000.000,00	385.732.000,00	14.268.000,00	96,43
TOTAL		11.140.000.000,00	10.641.105.952,84	498.894.047,16	95,52

5.1.2.2.1. Belanja Modal Jalan, irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, irigasi dan jaringan tahun 2021 adalah sebesar Rp50.254.877.560,21 dari anggaran sebesar Rp52.900.000.000,00 dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp40.541.301.981,04 Naik sebesar Rp9.713.575.579,17 atau 19,33%.



Tabel 5.1.8 Rincian Lengkap Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan

Kode REK	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	44.500.000.000,00	42.806.041.253,62	1.693.958.746,38	96,19
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	800.000.000,00	764.800.171,29	35.199.828,71	95,60
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	12.700.000.000,00	11.447.151.412,72	1.252.848.587,28	90,14
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	31.000.000.000,00	30.594.089.669,61	405.910.330,39	98,69
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	7.250.000.000,00	6.393.834.240,70	856.165.759,30	88,19
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	1.150.000.000,00	1.130.924.008,26	19.075.991,74	98,34
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	6.100.000.000,00	5.262.910.232,44	837.089.767,56	86,28
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.050.000.000,00	955.066.065,89	94.933.934,11	90,96
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	500.000.000,00	459.324.015,87	40.675.984,13	91,86
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	200.000.000,00	199.585.000,00	415.000,00	99,79
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	300.000.000,00	259.739.015,87	40.260.984,13	86,58
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	550.000.000,00	495.742.050,02	54.257.949,98	90,13
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	550.000.000,00	495.742.050,02	54.257.949,98	90,13
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	100.000.000,00	99.936.000,00	64.000,00	99,94
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	100.000.000,00	99.936.000,00	64.000,00	99,94
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	100.000.000,00	99.936.000,00	64.000,00	99,94
TOTAL		51.750.000.000,00	49.199.875.494,32	2.550.124.505,68	95,07



5.2. PENJELASAN ATAS NERACA

Neraca Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 dan Tahun 2020 diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

5.2.1. Aset

Saldo Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp221.394.273.033,21 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp183.023.360.504,83 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.1. Rincian Aset per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Aset	31-Des-21	31-Des-20	Naik/(Turun)	%
1	Aset Lancar	28.678.537,00	33.181.164,67	-4.502.627,67	-13,57
2	Aset Tetap	278.731.035.605,40	221.363.667.948,54	57.367.367.656,86	25,92
3	Aset Lainnya			0,00	
	Jumlah	278.759.714.142,40	221.396.849.113,21	57.362.865.029,19	25,91

Dari tabel di atas saldo aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp278.759.714.142,40 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp221.396.849.113,21 naik sebesar Rp57.362.865.029,19 atau 25,91% Lebih lanjut Aset diuraikan sesuai likuiditasnya sebagai berikut :

5.2.1.1. Aset Lancar

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.181.164,67 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp41.449.383,33 dengan uraian sebagai berikut :



Tabel 5.2.2. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Aset Lancar	31-Des-21	31-Des-20	Naik/(turun)	%
1	Beban Dibayar Dimuka	27.782.590,00	30.456.891,67	-2.674.301,67	-8,78
2	Persediaan	895.947,00	2.724.273,00	-1.828.326,00	-67,11
	Jumlah	28.678.537,00	33.181.164,67	-4.502.627,67	-13,57

Dari tabel di atas saldo aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.181.164,67 dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp41.449.383,33 turun sebesar Rp8.268.218,66 atau 24,92%. Lebih lanjut Aset Lancar diuraikan sebagai berikut :

5.2.1.1.1. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp27.782.590,00 dapat diuraikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo per 31 Desember 2020	30.456.891,67
	Pembayaran Beban dibayar dimuka tahun 2021	30.308.280,00
		60.765.171,67
	Beban dibayar dimuka yang telah jatuh tempo tahun 2021	32.982.581,67
	Saldo per 31 Desember 2021	27.782.590,00

Saldo Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp27.782.590,00 menurut perbandingan dengan saldo saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp30.456.891,67.

5.2.1.1.2. Persediaan



Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional. Saldo akhir Persediaan diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atas barang persediaan yang dimiliki pada akhir tahun penutupan buku.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp895.947,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.724.273,00 turun sebesar Rp1.828.326,00 atau 67,11%. Persediaan bahan pakai habis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Persediaan Alat Tulis Kantor yang masih tersisa sampai dengan 31 Desember 2021. Menurut jenis persediaan disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.2.3. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Persediaan	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	Naik / (Turun)	%
1	Persediaan bahan pakai habis	895.947,00	2.724.273,00	-1.828.326,00	-67,11
2	Persediaan bahan/material				
3	Persediaan barang lainnya				
	Jumlah	895.947,00	2.724.273,00	-1.828.326,00	-67,11

5.2.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah. Aset Tetap terdiri dari enam jenis yaitu Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Nilai Aset Tetap yang



disajikan di Neraca adalah Saldo seluruh Aset Tetap yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saldo yang disajikan Per 31 Desember 2021 adalah saldo konsolidasi atas Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Entitas Akuntansi dengan Laporan Keuangan PPKD.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp278.731.035.605,40 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp221.363.667.948,54 naik sebesar Rp57.367.367.656,86 atau 20,58% dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.2.4 Aset Tetap Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Kode Rek.	Aset Tetap	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Naik/Turun	%
01.03.01	Tanah	2.450.299.435,00	2.450.299.435,00	0,00	0,00
01.03.02	Peralatan dan Mesin	4.742.534.791,00	4.619.237.991,00	123.296.800,00	2,60
01.03.03	Gedung dan Bangunan	31.242.972.872,35	24.579.315.619,51	6.663.657.252,84	21,33
01.03.04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	292.884.831.025,05	221.512.151.123,03	71.372.679.902,02	24,37
01.03.05	Aset Tetap Lainnya			0,00	
01.03.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	197.250.000,00	1.074.643.500,00	-877.393.500,00	-444,81
01.03.07	Akumulasi Penyusutan	-52.786.852.518,00	-32.871.979.720,00	-19.914.872.798,00	37,73
	Jumlah	278.731.035.605,40	221.363.667.948,54	57.367.367.656,86	20,58

Aset tetap menurut jenis diuraikan lebih lanjut :

5.2.1.2.1. Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah berdasarkan nilai perolehan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.450.299.435,00 naik sebesar Rp2.450.299.435,00 atau sebesar 0,00% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.450.299.435,00. Tanah per jenis dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.2.5. Rincian Tanah Per 31 Desember 2021



(dalam rupiah)

NO	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Naik/Turun	%
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	1.731.299.435,00	1.731.299.435,00	0	0
2	Tanah Untuk Bangunan Instalasi	250.000.000,00	250.000.000,00	0	0
3	Tanah untuk Taman	469.000.000,00	469.000.000,00	0	
Jumlah		2.450.299.435,00	2.450.299.435,00	0	0

5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.742.534.791,00 naik sebesar Rp123.296.800,00 atau sebesar 2,60% dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.619.237.991,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.2.6 Rincian Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Naik/Turun	%
1	Alat-Alat Besar Darat	899.420.000,00	899.420.000,00	0,00	0,00
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.225.820.000,00	1.225.820.000,00	0,00	0,00
3	Alat Bengkel Bermesin	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,00
4	Alat Bengkel Tak Bermesin	100.725.000,00	100.725.000,00	0,00	0,00
5	Alat Ukur	21.351.000,00	19.866.000,00	1.485.000,00	7,48
6	Alat Pengolahan	12.485.000,00	12.485.000,00	0,00	0,00
7	Alat Kantor	347.714.194,00	287.005.194,00	60.709.000,00	21,15
8	Alat Rumah Tangga	1.239.169.297,00	1.234.510.297,00	4.659.000,00	0,38
9	Komputer	601.179.500,00	550.728.500,00	50.451.000,00	9,16
10	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	37.792.800,00	31.800.000,00	5.992.800,00	18,85
11	Alat Studio	39.868.000,00	39.868.000,00	0,00	0,00
12	Peralatan Pemancar	174.760.000,00	174.760.000,00	0,00	0,00
13	Unit-Unit Laboratorium	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00
TOTAL		4.742.534.791,00	4.619.237.991,00	123.296.800,00	2,67

Saldo Peralatan dan Mesin dapat diuraikan sebagai Berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Saldo Per 31 Desember 2020	4.619.237.991,00
2	Mutasi Tahun Anggaran 2021	
a	Mutasi Tambah Tahun Anggaran 2021	
1	Belanja Modal Tahun Anggaran	14.574.136.141.81,00



2021		
2	Reklasifikasi	0,00
3	Penerimaan Hibah	0
4	AT dari Belanja Non Modal	53.350.000,00
5	Mutasi Antar OPD/OPD	0
Jumlah Mutasi Tambah		14.627.486.141,81
b. Mutasi Kurang Tahun Anggaran 2021		
1	Ekstrakomptabel	3.327.000,00
2	Reklasifikasi	14.500.862.341,81
3	Penghapusan (penjualan & koreksi)	0
4	Belanja Modal Non Aset	0
5	Di Hibahkan	0
6	Mutasi Antar OPD/OPD	0
Jumlah Mutasi Kurang		14.504.189.341,81
3	Saldo Per 31 Desember 2021	4.742.534.791,00

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021
Mutasi Tambah dari Realisasi Belanja Modal sebesar
Rp14.574.136.141,81,00 dan dari AT dari Belanja Non Modal
Rp53.350.000,00 dan terdapat Mutasi Kurang dari Ekstrakomptabel
sebesar Rp3.327.000,00, dan Reklasifikasi yaitu alat kantor direklas
ke Jaringan Listrik sebesar Rp14.500.862.341,81.

5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021
sebesar Rp31.242.972.872,35 naik sebesar Rp6.663.657.252,84 atau
sebesar 21,33% dibanding per 31 Desember 2020 sebesar
24.579.315.619,51 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 5.2.7 Rincian Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Naik/Turun	%
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	18.776.302.073,15	12.112.644.820,31	6.663.657.252,84	35,49
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	9.047.100.000,00	9.047.100.000,00	0,00	0,00
3	Tugu Peringatan	2.790.257.453,20	2.790.257.453,20	0,00	0,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	629.313.346,00	629.313.346,00	0,00	0,00
TOTAL		31.242.972.872,35	24.579.315.619,51	6.663.657.252,84	21,33

Saldo Gedung dan Bangunan dapat diuraikan sebagai Berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Saldo Per 31 Desember 2020	24.579.315.619,51
2	Mutasi Tahun Anggaran 2021	
a	Mutasi Tambah Tahun Anggaran 2021	
1	Belanja Modal Tahun Anggaran 2021	10.641.105.952,84
2	Reklasifikasi	99.936.000,00
3	Penerimaan Hibah	
4	Belanja Non Modal	411.850.300,00
5	Mutasi Antar OPD/OPD	
Jumlah Mutasi Tambah		11.152.892.252,84
b.	Mutasi Kurang Tahun Anggaran 2021	
1	Ekstrakomptabel	
2	Reklasifikasi	3.246.794.000,00
3	Penghapusan (penjualan & koreksi)	
4	Belanja Modal Non Aset	1.242.441.000,00
5	Di Hibahkan	
6	Mutasi Antar OPD/OPD	
Jumlah Mutasi Kurang		4.489.235.000,00
3	Saldo Per 31 Desember 2021	31.242.972.872,35

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Mutasi Tambah Tahun Anggaran 2021



1. Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.641.105.952,84.
2. Atribusi dari Belanja Non Modal sebesar Rp411.850.300 merupakan Belanja Jasa yaitu Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan.
3. Reklasifikasi sebesar Rp99.936.000,00 adalah penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bersumber dari :

Jurnal Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Debet	Kredit
1.3.3.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	511.786.300,00	0
1.3.4.01.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0	411.850.300,00
1.3.6.01.	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik.	0	99.936.000,00
Total		511.786.300,00	511.786.300,00

b. Mutasi Kurang Tahun Anggaran 2021

Mutasi Kurang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.011.587.434,00 terdiri dari:

- 1) Reklasifikasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.246.794.000,00 sudah dijelaskan dalam akun peralatan mesin diatas.
- 2) Belanja Modal yang tidak menjadi asset sebesar Rp1.242.441.000,00 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Debet	Kredit
3.1.1.01.	Ekuitas	1.242.441.000,00	
1.3.7.02.	Jalan	3.246.794.000,00	
1.3.3.02.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	4.489.235.000,00
Total		4.489.235.000,00	4.489.235.000,00

5.2.1.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sesuai nilai perolehan per 31 Desember 2021 sebesar Rp292.884.831.025,05 naik sebesar Rp71.372.679.902,02 atau sebesar 24,37%



dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp221.512.151.123,03.

Uraian lebih lanjut disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.2.8 Rincian Jalan Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)					
NO	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Naik/Turun	%
1	Jalan	211.454.266.529,80	161.931.349.276,18	49.522.917.253,62	23,42
2	Jembatan	20.046.061.183,58	13.652.226.942,88	6.393.834.240,70	31,90
3	Bangunan Air Irigasi	1.345.269.102,91	1.345.269.102,91	0,00	0,00
4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.555.017.406,53	3.095.693.390,66	459.324.015,87	12,92
5	Bangunan Air Bersih/Baku	2.772.042.688,08	2.772.042.688,08	0,00	0,00
6	Bangunan Air Kotor	495.742.050,02	0	495.742.050,02	100,00
7	Instalasi Air Minum Bersih	1.780.000.000,00	1.780.000.000,00	0,00	0,00
8	Instalasi Pembangkit Listrik	3.469.739.550,00	3.469.739.550,00	0,00	0,00
9	Instalasi Gardu Listrik	150.051.000,00	150.051.000,00	0,00	0,00
10	Jaringan Air Minum	860.757.997,00	860.757.997,00	0,00	0,00
11	Jaringan Listrik	46.955.883.517,13	32.455.021.175,32	14.500.862.341,81	30,88
TOTAL		292.884.831.025,05	221.512.151.123,03	71.372.679.902,02	24,37

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat diuraikan sebagai Berikut :

(dalam rupiah)		
No.	Uraian	Nilai
1	Saldo Per 31 Desember 2020	221.512.151.123,03
2	Mutasi Tahun Anggaran 2021	
a	Mutasi Tambah Tahun Anggaran 2021	
1	Belanja Modal Tahun Anggaran 2021	50.254.877.560,21
2	Reklasifikasi	18.625.049.841,81
3	Penerimaan Hibah	
4	Belanja Non Modal	2.592.688.500,00
5	Mutasi Antar OPD/OPD	
Jumlah Mutasi Tambah		71.472.615.902,02
b.	Mutasi Kurang Tahun Anggaran 2021	
1	Ekstrakomptabel	
2	Reklasifikasi	99.936.000,00
3	Penghapusan (penjualan & koreksi)	
4	Belanja Modal Non Aset	
5	Di Hibahkan	



6 Mutasi Antar OPD/OPD

Jumlah Mutasi Kurang		99.936.000,00
3	Saldo Per 31 Desember 2021	292.884.831.025,05

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Mutasi Tambah Tahun Anggaran 2021

- Realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp50.254.877.560,21.
- Atribusi dari Belanja Non Modal yaitu belanja Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp2.592.688.500,00.
- Reklasifikasi sebesar Rp18.625.049.841,81.

Jurnal Penyusuaian

Kode	Uraian	Debet	Kredit
1.3.4.01.	Jalan	4.124.187.500,00	
1.3.3.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja		3.246.794.000,00
1.3.4.21.	Jaringan Listrik	14.500.862.341,81	
1.3.6.01.	KDP		877.393.500,00
1.3.2.14.	Alat Kantor		14.500.862.341,81
Total		18.625.049.841,81	18.625.049.841,81

b. Mutasi Kurang Tahun Anggaran 2021

Mutasi Kurang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp99.936.000,00 terdiri:

- 1) Reklasifikasi kurang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp99.936.000,00 ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jurnal Penghapusan Jalan, Irigasi, dan Jaringan :

Kode	Uraian	Debet	Kredit
1.3.3.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	99.936.000,00	0,00
1.3.4.13.	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik		99.936.000,00
Total		99.936.000,00	99.936.000,00



5.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tidak mempunyai Saldo Aset Tetap Lainnya tahun 2021 maupun tahun 2020.

5.2.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai nilai perolehan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp197.250.000,00 berkurang sebesar Rp877.393.500,00 atau 444,81% dibandingkan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.074.643.500,00. Uraian lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat diuraikan sebagai Berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Saldo Per 31 Desember 2020	1.074.643.500,00
2	Mutasi Tahun Anggaran 2021	
a	Mutasi Tambah Tahun Anggaran 2021	
1	Belanja Modal Tahun Anggaran 2021	
2	Reklasifikasi	
3	Penerimaan Hibah	
4	Belanja Non Modal	
5	Mutasi Antar OPD/OPD	
Jumlah Mutasi Tambah		
b.	Mutasi Kurang Tahun Anggaran 2021	
1	Ekstrakomptabel	
2	Reklasifikasi	877.393.500,00
3	Penghapusan (penjualan & koreksi)	
4	Belanja Modal Non Aset	
5	Di Hibahkan	
6	Mutasi Antar OPD/OPD	
Jumlah Mutasi Kurang		877.393.500,00
3	Saldo Per 31 Desember 2021	197.250.000,00



Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mutasi kurang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp877.393.500,00 bersumber dari Reklasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Jurnal Mutasi Tambah Kontruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Debet	Kredit
1.3.4.01	Jalan	877.393.500,00	0,00
1.3.6.01.	Konstruksi Dalam Pengerjaan.	0,00	877.393.500,00
Total		877.393.500,00	877.393.500,00

5.2.1.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021 sebesar - Rp52.786.852.518,00 dibandingkan dengan saldo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp32.871.831.527,00 bertambah sebesar Rp19.914.872.798,00 atau naik sebesar 37,73% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.9 Rincian Akumulasi Penyusutan

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Naik/Turun	%
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-3.573.126.153,00	-3.112.357.840,00	-460.768.313,00	12,90
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-2.039.617.361,00	-1.548.716.187,00	-490.901.174,00	24,07
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-47.174.109.004,00	-28.210.905.693,00	-18.963.203.311,00	40,20
jumlah		-52.786.852.518,00	-32.871.979.720,00	-19.914.872.798,00	37,73



Tabel 5.2.10 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Neraca
1	Saldo Per 31 Desember 2020	32.871.979.720,00
2	Mutasi Tambah Awal Tahun Anggaran 2021	
	Jumlah Mutasi Tambah Awal Tahun Anggaran 2021	135.831.873,00
3	Mutasi Kurang Awal Tahun Anggaran 2021	
	- Penghapusan Aset Peralatan Mesin	
	- Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan	0
	- Penghapusan Aset Jalan Irigasi Jaringan	
	Jumlah Mutasi Kurang Awal Tahun Anggaran 2021	
4	Saldo awal Tahun Anggaran 2021	33.007.811.593,00
5	Mutasi Tahun Anggaran 2021	
6	Mutasi Tambah Tahun Anggaran 2021	
7	Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2021	
	- Beban Penyusutan Aset Peralatan dan Mesin	460.768.313,00
	- Beban Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan	490.901.174,00
	- Beban Penyusutan Aset Jalan Irigasi Jaringan	18.827.371.438,00
	- Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
8	Jumlah Mutasi Tambah Tahun Anggaran 2021	19.914.872.798,00
9	Saldo Per 31 Desember 2021	52.786.852.518,00

5.2.1.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya ada Aset Lain-Lain yang diuraikan sebagai berikut :

5.2.1.3.1 Aset Lain-Lain

Tidak ada Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 maupun per 31 Desember 2020.

5.2.1.3. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Tidak ada Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 maupun per 31 Desember 2020.

Desember 2021 maupun per 31 Desember 2020.



5.3. PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan seluruh pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah dan beban yang ditanggung oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam periode tertentu, baik yang sudah diterima maupun yang akan diterima serta yang sudah dibayarkan maupun yang akan dibayar kemudian. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi pedoman perlakuan pendapatan dan belanja.

Laporan Operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1 Rincian Laporan Operasional Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Naik/Turun	%
PENDAPATAN - LO		0,00	11.520.156.181,00	0,00	100
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO		0	0	
	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0	0	0	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	11.520.156.181,00	0,00	100
	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	0	0	0	
POS LUAR BIASA		0	0	0	
	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	0	0	0	
BEBAN - LO		33.991.419.826,67	30.568.086.311,66	3.423.333.515,01	11,20
	BEBAN OPERASI - LO	33.991.419.826,67	30.568.086.311,66	3.423.333.515,01	11,20
	Beban Pegawai - LO	2.641.843.398,00	2.339.049.223,00	302.794.175,00	12,95
	Beban Barang dan Jasa	11.567.208.503,67	11.466.320.522,66	100.887.981,01	0,88
	Beban Hibah			0,00	0,00
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	19.779.040.925,00	16.593.947.916,00	3.185.093.009,00	19,19
	Beban Lain-lain	3.327.000,00	0	3.327.000,00	100,00
	BEBAN TRANSFER		0	0,00	0,00
	DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	168.768.650,00	-168.768.650,00	0,00
	BEBAN LUAR BIASA		0	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO		-33.991.419.826,67	-19.047.930.130,66	-14.943.489.696,01	78,45



Laporan Operasional diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

5.3.1 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam satu periode (Tahun Anggaran) baik diterima secara tunai atau pun diterima kemudian. Tidak terdapat Pendapatan Operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021.

5.3.2 Beban - LO

Beban-LO adalah seluruh pembiayaan yang timbul selama periode Tahun Anggaran 2021 baik yang dibayar secara tunai (*cash*) maupun Beban yang atas Beban tersebut sudah diperoleh jasa/barang, namun belum dibayar sampai berakhirnya periode Tahun Anggaran.

Beban-LO Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 sebesar Rp33.991.419.826,67 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp30.568.086.311,66 turun sebesar Rp3.423.333.515,01 atau 11,20%.

Beban-LO tersebut diuraikan secara terperinci menurut jenis Beban-LO dengan uraian sebagai berikut:

5.3.2.1 Beban Operasi - LO

Beban Operasi-LO merupakan pos beban untuk kegiatan rutin Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memberi manfaat jangka pendek. Beban Operasi-LO Tahun 2021 sebesar Rp33.991.419.826,67 dan tahun 2020 sebesar Rp30.399.317.661,66 naik sebesar Rp3.592.102.165,01 atau 11,82% menurut jenis Beban Operasional-LO diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.2 Rincian dan Perbandingan Beban Operasi - LO
Tahun Anggaran 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Naik/Turun	%
1	Beban Pegawai - LO	2.641.843.398,00	2.339.049.223,00	302.794.175,00	12,95
2	Beban Barang dan Jasa	11.567.208.503,67	11.466.320.522,66	100.887.981,01	0,88
3	Beban Hibah			0,00	0,00
4	Beban Penyusutan dan Amortisasi	19.779.040.925,00	16.593.947.916,00	3.185.093.009,00	19,19
5	Beban Lain-lain	3.327.000,00	0	3.327.000,00	100,00



Jumlah	33.991.419.826,67	30.399.317.661,66	3.592.102.165,01	11,82
--------	-------------------	-------------------	------------------	-------

5.3.2.1.1 Beban Pegawai – LO

Beban Pegawai-LO Tahun 2021 sebesar Rp2.641.843.398,00 dan tahun 2020 sebesar Rp2.339.049.223,00 naik sebesar 302.794.175,00 atau 12,95% diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.3 Rincian Beban Pegawai-LO
Tahun 2021 dan Tahun2020**

(dalam rupiah)					
NO	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Naik/Turun	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1.513.612.773,00	1.431.501.723,00	82.111.050,00	5,74
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	906.110.625,00	907.547.500,00	-1.436.875,00	-0,16
3	Beban Honorarium Kegiatan - LO	222.120.000,00		222.120.000,00	100,00
Jumlah		2.641.843.398,00	2.339.049.223,00	302.794.175,00	12,95

Beban Pegawai-LO Tahun 2021 sebesar Rp2.641.843.398,00 dibandingkan Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2021 sebesar Rp2.848.973.278,00 terdapat perbedaan sebesar Rp214.700.000,00 yaitu belanja Belanja Jasa Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa yang dimasukkan kedalam Beban Jasa.

5.3.2.1.2 Beban Beban Barang dan Jasa – LO

Beban Barang dan Jasa-LO Tahun 2021 sebesar Rp11.567.208.503,67 dan tahun 2020 sebesar Rp11.466.320.522,66 naik sebesar Rp100.887.981,01 atau 0,88% diuraian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.4 Rincian Beban Barang dan Jasa-LO
Tahun 2021 dan Tahun 2020**

(dalam rupiah)					
NO	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Naik/Turun	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	1.423.269.818,00	1.338.034.084,00	85.235.734,00	6,37
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	1.210.000,00	199.880.000,00	-198.670.000,00	-99,39
3	Beban Jasa Kantor	7.248.677.239,00	6.145.886.216,00	1.102.791.023,00	17,94



4	Beban Premi Asuransi	18.024.301,67	96.577.007,66	-78.552.705,99	-81,34
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	145.840.000,00	191.317.400,00	-45.477.400,00	-23,77
6	Beban Cetak dan Penggandaan		45.622.921,00	-45.622.921,00	-100,00
7	Beban Makanan dan Minuman	49.568.000,00	25.497.000,00	24.071.000,00	94,41
8	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	24.997.500,00	34.278.750,00	-9.281.250,00	-27,08
9	Belanja Pakaian Kerja		11.588.500,00	-11.588.500,00	-100,00
10	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu		29.111.500,00	-29.111.500,00	-100,00
11	Beban Perjalanan Dinas	235.582.195,00	431.807.144,00	-196.224.949,00	-45,44
12	Beban Pemeliharaan	109.198.000,00	39.780.000,00	69.418.000,00	174,50
13	Beban Jasa Konsultasi	2.055.741.450,00	2.154.115.000,00	-98.373.550,00	-4,57
14	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	0	30.000.000,00	100,00
15	Honorarium PNS	214.700.000,00	440.025.000,00	-225.325.000,00	-51,21
16	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	282.800.000,00	-272.400.000,00	-96,32
Jumlah		11.567.208.503,67	11.466.320.522,66	100.887.981,01	0,88

a. Beban Bahan Pakai Habis

Beban Bahan Pakai Habis -LO Tahun 2021 sebesar Rp1.423.269.818,00 dan tahun 2020 sebesar Rp1.338.034.084,00 turun sebesar 85.235.734,00 atau 6.37% dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.3.5 Rincian Perbandingan Beban Bahan Pakai Habis-LO Tahun 2021 dan Tahun 2020

<i>(dalam rupiah)</i>					
NO	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Naik/Turun	%
1	Beban Persediaan alat tulis kantor	83.248.371,00	94.265.542,00	-11.017.171,00	-11,69
2	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.246.963.532,00	1.234.067.500,00	12.896.032,00	1,05
3	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	82.674.726,00	3.330.000,00	79.344.726,00	2382,72
4	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	3.721.042,00	-3.721.042,00	-100
5	Beban Dekorasi	0,00	2.300.000,00	-2.300.000,00	-100
6	Beban Publikasi	0,00	350.000,00	-350.000,00	-100
7	Beban Perlengkapan Gedung Kantor	10.383.189,00	0,00	10.383.189,00	100
Jumlah		1.423.269.818,00	1.338.034.084,00	85.235.734,00	6,37

Beban Bahan Pakai Habis pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2021 sebesar Rp1.423.269.818,00 dibandingkan Belanja Pakai habis pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2021 sebesar Rp453.965.992,00



terdapat selisih sebesar Rp969.303.826,00. Perbedaan jumlah tersebut merupakan penambahan saldo dari belanja modal yang direklas menjadi beban alat listrik yang tidak menjadi aset sebesar Rp1.242.441.000,00 dan belanja yang lain yang masuk dalam Beban jasa.

b. Beban Material - LO

Beban Material pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2021 sebesar Rp1.210.000,00 dan Tahun 2020 sebesar 199.880.000,00 turun sebesar Rp198.670.000,00 atau 99,39%. Beban Material - LO tersebut merupakan Beban Persediaan bahan baku bangunan.

Beban Material pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2021 sebesar Rp1.210.000,00 dibandingkan dengan Belanja Material pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2021 merupakan belanja pakai habis yaitu Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp1.210.000,00 tidak terdapat selisih.

c. Beban Jasa Kantor - LO

Beban Jasa Kantor pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2021 adalah sebesar Rp7.248.677.239,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp6.145.886.216,00 turun sebesar 1.102.791.023,00 atau 17,94%.

Beban Jasa Kantor - LO pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2021 dan Tahun 2020 dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.6 Rincian Perbandingan Beban Jasa Kantor-LO
Tahun 2021 dan Tahun 2020**

(dalam rupiah)					
NO	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Naik/Turun	%
1	Beban jasa listrik		5.951.222.016,00	5.951.222.016,00	-100
2	Beban jasa surat kabar/majalah		7.200.000,00	-7.200.000,00	-100
3	Beban jasa kawat/faksimili/internet		64.200,00	-64.200,00	-100
4	Beban jasa Kerja	6.909.470.525,00	185.300.000,00	6.724.170.525,00	3.628,80
5	Beban Transportasi dan Akomodasi		2.100.000,00	-2.100.000,00	-100
6	Belanja jasa Kebersihan	263.600.000,00		263.600.000,00	100
7	Belanja jasa luran	40.256.714,00		40.256.714,00	100
8	Belanja jasa Penyusunan Data	35.350.000,00		35.350.000,00	100
	Jumlah	7.248.677.239,00	6.145.886.216,00	1.102.791.023,00	17,94



d. Beban Premi Asuransi

Beban Premi Asuransi pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2021 sebesar Rp18.024.301,67 dan Tahun 2020 sebesar Rp96.577.007,66 naik sebesar 78.552.705,99 atau 81.34% diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.7 Rincian Perbandingan Beban Premi Asuransi-LO
Tahun 2021 dan Tahun 2020**

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Naik/Turun	%
1	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	0,00	53.578.816,00	-53.578.816,00	-100
2	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	15.350.000,00	0	15.350.000,00	100
3	Beban Jasa Premi Asuransi Kendaraan Milik Daerah	2.674.301,67	42.998.191,66	-40.323.889,99	-93,78
	Jumlah	18.024.301,67	96.577.007,66	-78.552.705,99	-81,34

e. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor-LO

Beban Perawatan Kendaraan Bermotor pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2021 sebesar Rp145.840.000,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp191.317.400,00 turun sebesar Rp45.477.400,00 atau 23.77% diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.8 Rincian Perbandingan Beban Perawatan Kendaraan Bermotor -LO Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Naik/Turun	%
1	Beban jasa Service	0,00	28.409.000,00	-28.409.000,00	-100
2	Beban Penggantian Suku Cadang	55.455.000,00	62.900.000,00	-7.445.000,00	-11,84
3	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	90.385.000,00	99.015.000,00	-8.630.000,00	-8,72
4	Beban Pajak Kendaraan Bermotor		993.400,00	-993.400,00	-100
	Jumlah	145.840.000,00	191.317.400,00	-45.477.400,00	-23,77

f. Beban Cetak dan Penggandaan - LO

Beban Cetak dan Penggandaan pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp45.622.921,00 turun sebesar Rp45.622.921,00 atau 100% diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.9 Rincian Perbandingan Beban Cetak dan Penggandaan -LO



Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Naik/Turun	%
1	Beban Cetak	0,00	36.743.671,00	36.743.671,00	-100
2	Beban Penggandaan	0,00	8.879.250,00	8.879.250,00	-100
	Jumlah	0,00	45.622.921,00	45.622.921,00	-100

g. Beban Makanan dan Minuman - LO

Beban Makanan dan Minuman pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2021 sebesar Rp49.568.000,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp25.497.000,00 turun sebesar Rp24.071.000,00 atau 94,41%. Beban Makanan dan Minuman - LO tersebut merupakan Beban makanan dan minuman rapat sebesar Rp25.497.000,00.

Beban Makanan dan Minuman pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2021 sebesar Rp49.568.000,00 dibandingkan dengan Belanja Makanan dan Minuman pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2021 sebesar Rp49.568.000,00 tidak terdapat selisih.

h. Beban Pakaian - LO

Beban Pakaian pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2021 sebesar Rp24.997.500,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp74.978.750,00 naik sebesar Rp49.981.250,00 atau 66,66% diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.10 Rincian Perbandingan Beban Pakaian - LO
Tahun 2021 dan Tahun 2020**

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Naik/Turun	%
1	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	24.997.500,00	34.278.750,00	-9.281.250,00	-27,08
2	Belanja Pakaian Kerja	0,00	11.588.500,00	-11.588.500,00	-100
3	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	29.111.500,00	-29.111.500,00	-100
	Jumlah	24.997.500,00	74.978.750,00	-49.981.250,00	-66,66

Beban Pakaian pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2021 sebesar Rp24.997.500,00 dibandingkan dengan Belanja Pakaian pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2021 sebesar Rp24.997.500,00 tidak terdapat selisih.

i. Beban Perjalanan Dinas - LO



Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2021 sebesar Rp235.582.195,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp431.807.144,00 turun sebesar Rp196.224.949,00 atau 45.44% diuraian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.11 Rincian Perbandingan Beban Perjalanan Dinas – LO
Tahun 2021 dan Tahun 2020**

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Naik/Turun	%
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah	235.582.195,00	264.729.746,00	-29.147.551,00	-11,01
2	Beban perjalanan dinas luar daerah		167.077.398,00	-167.077.398,00	-100
	Jumlah	235.582.195,00	431.807.144,00	-196.224.949,00	-45,44

Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2021 sebesar Rp235.582.195,00 dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2021 sebesar Rp235.582.195,00 tidak terdapat selisih.

j. Beban Pemeliharaan dan Jasa Konsultasi - LO

Beban Pemeliharaan dan Jasa Konsultasi pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2021 sebesar Rp2.164.939.450,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp2.193.895.000,00 turun sebesar Rp28.955.550,00 atau 1.32% diuraian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.12 Rincian Perbandingan Beban Pemeliharaan dan Jasa
Konsultasi – LO Tahun 2021 dan Tahun 2020**

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Naik/Turun	%
1	Beban Pemeliharaan	109.198.000,00	39.780.000,00	69.418.000,00	174,50
2	Beban Jasa Konsultasi	2.055.741.450,00	2.154.115.000,00	-98.373.550,00	-4,57
	Jumlah	2.164.939.450,00	2.193.895.000,00	-28.955.550,00	-1,32

k. Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS –LO

Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2021 sebesar Rp30.000.000,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp30.000.000,00 atau 100%.

l. Beban Honorarium



Beban Honorarium PNS dan non-PNS pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2021 sebesar Rp225.100.000,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp722.825.000,00 atau 68.86%.

NO	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Naik/Turun	%
1	Honorarium PNS	214.700.000,00	440.025.000,00	-225.325.000,00	-51,21
2	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	282.800.000,00	-272.400.000,00	-96,32
	Jumlah	225.100.000,00	722.825.000,00	-497.725.000,00	-68,86

5.3.2.1.3 Beban Hibah - LO

Tidak terdapat Beban Hibah pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2021 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan tahun 2020.

5.3.2.1.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2021 dan tahun 2020 sebesar Rp19.779.040.925,00 dan Rp16.593.947.916,00 naik sebesar Rp3.185.093.009,00 atau 19.19% dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.3.13 Rincian Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020	Naik/Turun	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	460.768.313,00	522.050.828,00	-61.282.515,00	-11,74
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	490.901.174,00	970.984.002,00	-480.082.828,00	-49,44
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18.827.371.438,00	15.100.913.086,00	3.726.458.352,00	24,68
	Jumlah	19.779.040.925,00	16.593.947.916,00	3.185.093.009,00	19,19

5.3.2.1.5 DEFISIT NON OPERASIONAL

Defisit Non Operasional pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2021 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp168.768.650,00 turun sebesar Rp168.768.650,00 atau 100%.



5.4. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai pos-pos Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, dan koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas.

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Tahun 2021 sebesar Rp221.396.849.113,21 dan tahun 2020 sebesar Rp183.023.360.504,83 naik sebesar Rp38.373.488.608,38 atau 20,97.

5.4.2 RK PPKD LO

RK PPKD Tahun 2021 Sebesar Rp91.490.116.728,86 dan tahun 2020 Rp57.827.401.158,04 naik sebesar Rp33.662.715.570,82 atau 58,21%.

5.4.3 Surplus / Defisit LO

Surplus /defisit LO diperoleh dari Laporan Operasional. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Nilai surplus/defisit - LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.991.419.826,67 Surplus/Defisit LO tahun 2021 naik sebesar 14.943.489.696,01 atau 78,45% dibandingkan surplus/defisit LO tahun 2020 sebesar Rp19.047.930.130,66.

Surplus/Defisit Laporan Operasional per tanggal 31 Desember 2021 secara rinci telah diuraikan dalam penjelasan Laporan Operasional.



5.4.4 Dampak Kumulatif dan Koreksi Kesalahan LO

Dampak Kumulatif dan Koreksi Kesalahan adalah transaksi yang mempengaruhi nilai ekuitas. Dampak Kumulatif dan Koreksi Kesalahan per 31 Desember 2021 sebesar Rp135.831.873,00 dibandingkan surplus/defisit LO tahun 2020 sebesar Rp405.834.226,00 naik sebesar Rp270.002.353,00 atau 66,53% dengan rincian sebagai berikut :

5.4.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir tahun 2021 sebesar Rp278.759.714.142,40 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.4.2 Ekuitas Akhir

(dalam rupiah)		
NO	URAIAN	NILAI
1	EKUITAS AWAL	221.396.997.306,21
2	RK PPKD	91.490.116.728,86
3	Surplus/Defisit - LO	-33.991.419.826,67
4	Dampak Kumulatif dan Koreksi Kesalahan	-135.831.873,00
JUMLAH EKUITAS AKHIR		278.759.714.142,40

Ekuitas Akhir Tahun 2021 sebesar Rp278.759.714.142,40 naik sebesar Rp57.362.716.836,19 atau 25,91% dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun 2020 sebesar Rp221.396.997.306,21.



BAB VI

INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Sifat Operasi

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tugas Pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat diuraikan sebagai berikut:

- perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan permukiman;
- pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman;
- pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perumahan dan permukiman;
- pelaksanaan teknis operasional di bidang perumahan dan permukiman;
- pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana Dinas;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan permukiman;
- pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan permukiman;



BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan rincian pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pada Laporan Realisasi Anggaran Belanja, dianggarkan sebesar Rp97.451.429.579,00 dan direalisasikan sebesar Rp91.490.116.728,86 atau 93,88%.
2. Pada Neraca, posisi Aset pada Tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp278.759.714.142,40 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp221.396.997.306,21.
3. Pada Laporan Operasional, posisi Surplus/Defisit Lo pada Tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp33.991.419.826,67 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp19.047.930.130,66.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021, penyusunan Laporan Keuangan ini telah diupayakan mengacu pada format sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan Keuangan ini merupakan tekad kami dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini, terlihat dengan jelas kinerja keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga dapat digunakan oleh para *stakeholders* dan terbuka untuk diketahui oleh para pengguna laporan ini.

Kendala utama yang kami hadapi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah lemahnya SDM pegawai terutama untuk spesialisasi Akuntansi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan perangkat penunjang dalam operasional Manajemen Keuangan Daerah yang kurang memadai. Namun demikian, berbagai kebijakan yang kami tempuh telah dapat memperbaiki kinerja keuangan dari tahun ke tahun.



Sebagai akhir kata, kami beserta segenap aparat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengharapkan agar Laporan Keuangan Tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Kuala Tungkal, 31 Desember 2021

Pengguna Anggaran



SYAFRUN ST

NIP. 19821126 201001 1 015



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

RINCIAN BARANG KE NERACA

PER 30-Dec-2021

Provinsi : PROVINSI JAMBI
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Bidang : Bidang Kimpraswil/PU
Unit Organisasi : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
U P B : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	
		319.042.360.921,43
1.3.1	TANAH	2.450.299.435,00
1.3.1.01	TANAH	2.450.299.435,00
1.3.1.01.01	TANAH PERSIL	1.731.299.435,00
1.3.1.01.01.04	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	1.731.299.435,00
1.3.1.01.01.04.01	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.731.299.435,00
1.3.1.01.03	LAPANGAN	719.000.000,00
1.3.1.01.03.09	TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI	250.000.000,00
1.3.1.01.03.09.05	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Listrik	250.000.000,00
1.3.1.01.03.13	TANAH UNTUK TAMAN	469.000.000,00
1.3.1.01.03.13.03	Tanah Lapangan Taman lainnya	469.000.000,00
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	4.695.225.991,00
1.3.2.01	ALAT BESAR	899.420.000,00
1.3.2.01.01	ALAT BESAR DARAT	899.420.000,00
1.3.2.01.01.10	ALAT PENGANGKAT	899.420.000,00
1.3.2.01.01.10.03	Truck Crane	845.100.000,00
1.3.2.01.01.10.18	alat pengangkat lainnya (dst)	54.320.000,00
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	1.225.820.000,00
1.3.2.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1.225.820.000,00
1.3.2.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	532.000.000,00
1.3.2.02.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	532.000.000,00
1.3.2.02.01.03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	324.625.000,00
1.3.2.02.01.03.02	Pick Up	324.625.000,00
1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	106.895.000,00
1.3.2.02.01.04.01	Sepeda Motor	106.895.000,00
1.3.2.02.01.06	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	262.300.000,00
1.3.2.02.01.06.06	Mobil Tangki Air	262.300.000,00
1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	133.041.000,00
1.3.2.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	12.450.000,00
1.3.2.03.01.01	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	12.450.000,00
1.3.2.03.01.01.41	perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst)	12.450.000,00
1.3.2.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	100.725.000,00
1.3.2.03.02.07	PERKAKAS BENGKEL KERJA	10.850.000,00
1.3.2.03.02.07.09	perkakas bengkel kerja lainnya (dst)	10.850.000,00
1.3.2.03.02.11	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	89.875.000,00
1.3.2.03.02.11.03	Rol Meter	89.875.000,00
1.3.2.03.03	ALAT UKUR	19.866.000,00
1.3.2.03.03.01	ALAT UKUR UNIVERSAL	19.866.000,00
1.3.2.03.03.01.72	Global Positioning System	19.866.000,00
1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	12.485.000,00
1.3.2.04.01	ALAT PENGOLAHAN	12.485.000,00
1.3.2.04.01.10	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	12.485.000,00
1.3.2.04.01.10.01	Alat Pengolahan lainnya	12.485.000,00
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.606.665.491,00
1.3.2.05.01	ALAT KANTOR	287.005.194,00
1.3.2.05.01.02	MESIN HITUNG/MESIN JUNLAH	2.475.000,00
1.3.2.05.01.02.12	Mesin Penghitung Uang	2.475.000,00
1.3.2.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	53.850.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

RINCIAN BARANG KE NERACA

PER 30-Dec-2021

Provinsi : PROVINSI JAMBI
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Bidang : Bidang Kimpraswil/PU
Unit Organisasi : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
U P B : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3.2.08.01.06	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	29.800.000,00
1.3.2.08.01.06.62	Concrete Hammer Set	29.800.000,00
1.3.2.10	KOMPUTER	573.366.500,00
1.3.2.10.01	KOMPUTER UNIT	473.457.000,00
1.3.2.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	473.457.000,00
1.3.2.10.01.02.01	P.C Unit	194.130.000,00
1.3.2.10.01.02.02	Lap Top	251.002.000,00
1.3.2.10.01.02.03	Note Book	28.325.000,00
1.3.2.10.02	PERALATAN KOMPUTER	99.909.500,00
1.3.2.10.02.01	PERALATAN MAINFRAME	2.997.500,00
1.3.2.10.02.01.12	Hard Disk	2.997.500,00
1.3.2.10.02.02	PERALATAN MINI KOMPUTER	6.490.000,00
1.3.2.10.02.02.09	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	6.490.000,00
1.3.2.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	90.422.000,00
1.3.2.10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	80.643.000,00
1.3.2.10.02.03.04	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	9.779.000,00
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	30.705.908.381,35
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	26.848.663.505,15
1.3.3.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	16.888.508.630,15
1.3.3.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	4.255.170.921,68
1.3.3.01.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.162.158.800,00
1.3.3.01.01.01.05	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2.093.012.121,68
1.3.3.01.01.02	BANGUNAN GUDANG	128.804.000,00
1.3.3.01.01.02.14	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	128.804.000,00
1.3.3.01.01.08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	78.086.639,51
1.3.3.01.01.08.04	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	78.086.639,51
1.3.3.01.01.09	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	4.787.982.549,00
1.3.3.01.01.09.01	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	164.894.346,00
1.3.3.01.01.09.04	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	2.860.140.437,00
1.3.3.01.01.09.05	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen	219.433.533,00
1.3.3.01.01.09.06	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Darurat	1.543.514.233,00
1.3.3.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	186.760.000,00
1.3.3.01.01.10.05	Bangunan Trmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	186.760.000,00
1.3.3.01.01.30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	322.091.875,00
1.3.3.01.01.30.05	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	322.091.875,00
1.3.3.01.01.32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	439.192.086,00
1.3.3.01.01.32.05	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	439.192.086,00
1.3.3.01.01.36	TAMIAN	6.690.420.558,96
1.3.3.01.01.36.01	Taman Permanen	6.690.420.558,96
1.3.3.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	9.960.154.875,00
1.3.3.01.02.04	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	16.750.000,00
1.3.3.01.02.04.01	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	16.750.000,00
1.3.3.01.02.08	FLAT/RUMAH SUSUN	9.047.100.000,00
1.3.3.01.02.08.01	Flat/Rumah Susun Permanen	9.047.100.000,00
1.3.3.01.02.13	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	896.304.875,00
1.3.3.01.02.13.01	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	896.304.875,00
1.3.3.02	MONUMEN	2.790.257.453,20
1.3.3.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	2.790.257.453,20
1.3.3.02.01.02	TUGU	2.052.196.685,20



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

RINCIAN BARANG KE NERACA

PER 30-Dec-2021

Provinsi : PROVINSI JAMBI
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Bidang : Bidang Kimpraswil/PU
Unit Organisasi : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
U P B : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1.066.987.423,00
1.3.3.04.01	TUGU/TANDA BATAS	1.066.987.423,00
1.3.3.04.01.01	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	629.313.346,00
1.3.3.04.01.01.03	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten	429.753.346,00
1.3.3.04.01.01.07	Tugu/Tanda Batas Administrasi Desa	199.560.000,00
1.3.3.04.01.04	PAGAR	437.674.077,00
1.3.3.04.01.04.01	Pagar Permanen	437.674.077,00
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	280.993.677.114,08
1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	219.817.367.477,30
1.3.4.01.01	JALAN	205.148.080.161,66
1.3.4.01.01.03	JALAN KABUPATEN	73.532.825.295,27
1.3.4.01.01.03.03	Jalan Kabupaten Lokal	68.261.736.145,57
1.3.4.01.01.03.05	Jalan Kabupaten Lain-lain	5.271.089.149,70
1.3.4.01.01.05	JALAN DESA	126.522.896.861,60
1.3.4.01.01.05.01	Jalan Desa	119.478.821.064,85
1.3.4.01.01.05.02	Jalan Desa Lain-lain	7.044.075.796,84
1.3.4.01.01.09	JALAN KHUSUS	5.092.358.004,70
1.3.4.01.01.09.02	Jalan Khusus Kompleks	1.407.932.000,00
1.3.4.01.01.09.08	Jalan Khusus Lainnya	3.684.426.004,70
1.3.4.01.02	JEMBATAN	14.669.287.315,64
1.3.4.01.02.03	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	9.780.279.315,15
1.3.4.01.02.03.01	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	9.390.724.640,39
1.3.4.01.02.03.03	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	248.154.674,76
1.3.4.01.02.03.05	Jembatan Kabupaten/kota Lain-lain	141.400.000,00
1.3.4.01.02.05	JEMBATAN PADA JALAN DESA	4.889.008.000,49
1.3.4.01.02.05.01	Jembatan Pada Jalan Desa	4.514.290.977,16
1.3.4.01.02.05.02	Jembatan Desa Lain-lain	374.717.023,33
1.3.4.02	BANGUNAN AIR	7.213.005.181,65
1.3.4.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	1.345.269.102,91
1.3.4.02.01.06	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	1.345.269.102,91
1.3.4.02.01.06.13	Bangunan Mandi Hewan	1.345.269.102,91
1.3.4.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	3.095.693.390,66
1.3.4.02.04.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	3.095.693.390,66
1.3.4.02.04.04.02	Saluran Drainage	3.095.693.390,66
1.3.4.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	2.772.042.688,08
1.3.4.02.06.02	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU	2.699.999.890,00
1.3.4.02.06.02.08	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	2.699.999.890,00
1.3.4.02.06.05	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	72.042.798,08
1.3.4.02.06.05.07	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	72.042.798,08
1.3.4.03	INSTALASI	5.399.790.550,00
1.3.4.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	1.780.000.000,00
1.3.4.03.01.05	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	1.780.000.000,00
1.3.4.03.01.05.03	Penampungan Air Hujan (PAH)	1.780.000.000,00
1.3.4.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	3.469.739.550,00
1.3.4.03.05.09	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	3.469.739.550,00
1.3.4.03.05.09.01	Instalasi PLTS Kapasitas Kecil	3.037.964.000,00
1.3.4.03.05.09.02	Instalasi PLTS Kapasitas Sedang	431.775.550,00
1.3.4.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	150.051.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

RINCIAN BARANG KE NERACA

PER 30-Dec-2021

Provinsi : PROVINSI JAMBI
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Bidang : Bidang Kimpraswil/PU
Unit Organisasi : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPB : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3.4.04.01	JARINGAN AIR MINUM	860.757.997,00
1.3.4.04.01.02	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI	860.757.997,00
1.3.4.04.01.02.02	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	860.757.997,00
1.3.4.04.02	JARINGAN LISTRIK	47.702.755.908,13
1.3.4.04.02.01	JARINGAN TRANSMISI	30.800.712.620,26
1.3.4.04.02.01.01	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 3 KVA	98.951.000,00
1.3.4.04.02.01.02	Jaringan Transmisi Tegangan 1 S/D 3 KVA	30.701.761.620,26
1.3.4.04.02.02	JARINGAN DISTRIBUSI	16.902.043.287,87
1.3.4.04.02.02.04	Jaringan Distribusi Lain-lain	16.902.043.287,87
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	197.250.000,00
1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	197.250.000,00
1.3.6.01.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	197.250.000,00
1.3.6.01.01.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	197.250.000,00
1.3.6.01.01.01.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	97.700.000,00
1.3.6.01.01.01.05	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	99.550.000,00



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Jalan Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi. MS, SH
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36511

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Kuala Tungkal, 31 Desember 2021

Pengguna Anggaran

SYAFRUN. ST

NIP. 19821126 201001 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2021

Bidang : Bidang Kimpraswil/PU
Unit Organisasi : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKIMAN

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI
Aset Tetap					Ttn	Bulan	1 Jan 2021	Semester I	Semester II	31-Dec-2021	
2		PERALATAN DAN MESIN		328,870,388,698.00			5,112,357,840.00	228,142,934.00	232,625,979.00	3,573,126,153.00	
1.3.2.1		ALAT BESAR		4,742,554,791.00							
1.3.2.1.1		ALAT BESAR DARAT		899,420,000.00			629,994,000.00	44,971,000.00	44,971,000.00	719,536,000.00	
1.3.2.2		ALAT ANGKUTAN									
1.3.2.2.1		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		1,225,320,000.00			1,225,820,000.00	0.00	0.00	1,225,820,000.00	
1.3.2.3		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR									
1.3.2.3.1		ALAT BENGKEL BERMESIN		12,450,000.00			9,960,000.00	622,500.00	622,500.00	11,205,000.00	
1.3.2.3.2		ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		100,725,000.00			78,243,750.00	2,997,500.00	2,997,500.00	84,238,750.00	
1.3.2.3.3		ALAT UKUR		19,885,000.00			15,892,800.00	1,986,800.00	1,986,800.00	19,896,000.00	
1.3.2.4		ALAT PERTANIAN									
1.3.2.4.1		ALAT PENGOLAHAN		12,485,000.00			3,391,385.00	1,560,625.00	1,560,625.00	6,522,605.00	
1.3.2.5		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA									
1.3.2.5.1		ALAT KANTOR		26,564,194.00			74,467,521.00	27,020,518.00	27,743,166.00	128,631,207.00	
1.3.2.5.2		ALAT RUMAH TANGGA		1,295,845,237.00			619,677,366.00	92,661,753.00	95,462,339.00	807,801,456.00	
1.3.2.5.3		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PELABAT		37,730,800.00			31,800,000.00	0.00	99,876.00	31,899,876.00	
1.3.2.6		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR									
1.3.2.6.1		ALAT STUDIO		45,663,000.00			26,665,333.00	2,590,000.00	2,689,917.00	31,945,250.00	
1.3.2.6.3		PERALATAN PEMANCAR		174,740,000.00			31,108,000.00	8,738,000.00	8,738,000.00	48,564,000.00	
1.3.2.8		ALAT LABORATORIUM									
1.3.2.8.1		UNIT ALAT LABORATORIUM		23,800,000.00			6,518,750.00	1,862,500.00	1,862,500.00	10,243,750.00	
1.3.2.10		KOMPUTER									
1.3.2.10.1		KOMPUTER UNIT		465,463,000.00			310,509,583.00	32,910,041.00	33,949,541.00	377,368,903.00	
1.3.2.10.2		PERALATAN KOMPUTER		99,609,500.00			48,719,612.00	10,221,897.00	10,241,813.00	69,483,322.00	
3		GEDUNG DAN BANGUNAN		31,242,872,372.00			1,548,716,187.00	243,408,715.00	247,402,459.00	2,039,617,361.00	
1.3.3.1		BANGUNAN GEDUNG									
1.3.3.1.1		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		12,315,765,576.00			735,897,987.00	109,941,042.00	113,605,202.00	959,041,231.00	



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGPABAD BARAT

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2021

Bidang : Bidang Kimpraswil/PU
Unit Organisasi : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2021	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2021	NILAI
					Tln	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.3.1.2		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		9.960.154.875.00			729.703.096.00	99.461.966.00	99.601.549.00	923.766.611.00	
1.3.3.2		MONUMEN									
1.3.3.2.1		CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI		2.790.257.453.00			33.070.038.00	27.902.574.00	27.902.574.00	88.875.161.00	
1.3.3.4		TUGU TITIK KONTROL/PASTI									
1.3.3.4.1		TUGU/TANDA BATAS		1.176.865.020.00			50.345.071.00	6.203.133.00	6.203.134.00	62.911.388.00	
4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		292.884.831.025.00			28.346.737.566.00	9.039.586.585.00	9.787.785.853.00	47.174.109.004.00	24
1.3.4.1		JALAN DAN JEMBATAN									
1.3.4.1.1		JALAN		209.618.475.180.00			23.694.854.492.00	8.203.640.673.00	8.581.153.814.00	40.779.645.979.00	1
1.3.4.1.2		JEMBATAN		21.189.430.054.00			573.272.955.00	137.021.258.00	152.474.394.00	882.766.585.00	
1.3.4.2		BANGUNAN AIR									
1.3.4.2.1		BANGUNAN AIR IRIGASI		1.345.269.103.00			75.730.134.00	13.452.691.00	13.452.691.00	102.635.506.00	
1.3.4.2.4		BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM		3.561.436.399.00			390.157.973.00	154.784.663.00	158.915.864.00	703.858.506.00	
1.3.4.2.6		BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU		2.772.042.688.00			75.076.162.00	34.650.535.00	34.650.535.00	144.377.722.00	
1.3.4.3		INSTALASI									
1.3.4.3.1		INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU		1.790.000.000.00			123.611.112.00	29.666.667.00	29.666.667.00	182.944.446.00	
1.3.4.3.5		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK		3.459.735.550.00			684.151.748.00	43.371.740.00	43.371.748.00	770.895.256.00	
1.3.4.3.6		INSTALASI GARDU LISTRIK		150.051.000.00			32.994.300.00	1.875.038.00	1.875.037.00	36.745.575.00	
1.3.4.4		JARINGAN									
1.3.4.4.1		JARINGAN AIR MINUM		860.757.997.00			220.843.542.00	14.345.065.00	14.345.066.00	229.535.476.00	
1.3.4.4.2		JARINGAN LISTRIK		48.112.625.054.00			2.496.046.158.00	406.775.749.00	457.878.598.00	3.380.702.443.00	
Aset Tetap yang dihapuskan				Jumlah Aset Tetap			33.007.811.593.00	9.511.227.234.00	10.267.813.691.00	53.786.852.518.00	276
4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		5.879.929.658.00			562.417.017.00	281.461.350.00	234.551.125.00	1.078.429.402.00	
1.3.4.1		JALAN DAN JEMBATAN									
1.3.4.1.1		JALAN		5.879.929.658.00			562.417.017.00	281.461.350.00	234.551.125.00	1.078.429.402.00	



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2021

Bidang : Bidang Kimpraswil/PU
Unit Organisasi : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2021	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2021	NILAI
				Tmn	Bulan		Semester I	Semester II		
Jumlah Aset Tetap yang dihapuskan				5,979,929,658.00		562,417,017.00	281,461,350.00	234,551,125.00	1,078,429,492.00	
Jumlah				334,750,268,347.00		33,570,228,610.00	9,792,688,584.00	10,502,364,816.00	53,665,782,010.00	28



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SKPD : 1.04.01. - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	97.451.429.579,00	91.490.116.728,86	5.961.312.850,14	93,81
5.1	BELANJA OPERASI	18.589.201.939,00	16.019.997.074,00	2.569.204.865,00	86,18
5.1.01	Belanja Pegawai	3.173.780.938,00	2.848.973.278,00	324.807.660,00	89,77
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.631.164.462,00	1.470.692.653,00	160.471.809,00	90,16
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.128.748.262,00	1.080.589.360,00	48.158.902,00	95,73
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.128.748.262,00	1.080.589.360,00	48.158.902,00	95,73
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	111.545.300,00	99.306.815,00	12.238.485,00	89,03
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	111.545.300,00	99.306.815,00	12.238.485,00	89,03
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	140.605.500,00	99.080.000,00	41.525.500,00	70,47
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	140.605.500,00	99.080.000,00	41.525.500,00	70,47
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.440.000,00	2.560.000,00	9.880.000,00	20,58
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.440.000,00	2.560.000,00	9.880.000,00	20,58
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	47.355.000,00	29.845.000,00	17.510.000,00	63,02
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	47.355.000,00	29.845.000,00	17.510.000,00	63,02
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	83.512.000,00	72.420.000,00	11.092.000,00	86,72
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	83.512.000,00	72.420.000,00	11.092.000,00	86,72
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.913.000,00	349.140,00	1.563.860,00	18,25
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.913.000,00	349.140,00	1.563.860,00	18,25
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	532.000,00	14.290,00	517.710,00	2,69
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	532.000,00	14.290,00	517.710,00	2,69
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	94.504.600,00	77.641.923,00	16.862.677,00	82,16
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	94.504.600,00	77.641.923,00	16.862.677,00	82,16
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.780.000,00	2.221.498,00	558.502,00	79,91
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.780.000,00	2.221.498,00	558.502,00	79,91
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.228.800,00	6.664.627,00	564.173,00	92,20
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.228.800,00	6.664.627,00	564.173,00	92,20
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.050.856.476,00	906.110.625,00	144.745.851,00	86,23
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.050.856.476,00	906.110.625,00	144.745.851,00	86,23
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.050.856.476,00	906.110.625,00	144.745.851,00	86,23
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	491.760.000,00	472.170.000,00	19.590.000,00	96,02
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	450.960.000,00	436.820.000,00	14.140.000,00	96,86
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	234.960.000,00	222.120.000,00	12.840.000,00	94,54
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	216.000.000,00	214.700.000,00	1.300.000,00	99,40
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	40.800.000,00	35.350.000,00	5.450.000,00	86,64
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	40.800.000,00	35.350.000,00	5.450.000,00	86,64
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.415.421.001,00	13.171.023.796,00	2.244.397.205,00	85,44
5.1.02.01	Belanja Barang	522.679.001,00	453.965.992,00	68.713.009,00	86,85
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	522.679.001,00	453.965.992,00	68.713.009,00	86,85
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.216.000,00	1.210.000,00	6.000,00	99,51
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	108.630.000,00	90.385.000,00	18.245.000,00	83,20
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	57.500.000,00	55.455.000,00	2.045.000,00	96,44
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.278.000,00	1.275.000,00	3.000,00	99,76

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.383.309,00	10.383.189,00	120,00	100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	71.885.000,00	49.568.000,00	22.317.000,00	68,95
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	28.500.000,00	24.997.500,00	3.502.500,00	87,71
5.1.02.02	Belanja Jasa	14.290.454.000,00	12.372.277.609,00	1.918.176.391,00	86,58
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.761.010.000,00	7.183.470.525,00	1.577.539.475,00	81,95
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.400.000,00	10.400.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	50.400.000,00	-	50.400.000,00	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	597.000.000,00	587.000.000,00	10.000.000,00	98,32
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	152.400.000,00	135.400.000,00	17.000.000,00	88,85
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	110.000.000,00	-	110.000.000,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	264.600.000,00	263.600.000,00	1.000.000,00	99,62
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	75.000.000,00	74.400.000,00	600.000,00	99,20
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	350.000,00	350.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.100.000,00	6.500.000,00	600.000,00	91,55
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.500.000,00	3.850.000,00	650.000,00	85,56
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.200.000,00	1.066.000,00	134.000,00	88,83
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.368.000.000,00	5.999.457.245,00	1.368.542.755,00	81,43
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	-	100,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	38.460.000,00	21.047.280,00	17.412.720,00	54,73
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	191.444.000,00	98.526.834,00	92.917.166,00	51,47
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	106.872.000,00	42.920.120,00	63.951.880,00	40,16
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	63.072.000,00	40.256.714,00	22.815.286,00	63,83
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	21.500.000,00	15.350.000,00	6.150.000,00	71,40
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.278.000.000,00	5.060.280.250,00	217.719.750,00	95,87
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	3.960.000.000,00	3.795.617.950,00	164.382.050,00	95,85
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	1.318.000.000,00	1.264.662.300,00	53.337.700,00	95,95
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	50,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	50,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	141.750.000,00	109.198.000,00	32.552.000,00	77,04
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76.750.000,00	63.355.000,00	13.395.000,00	82,55
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.190.000,00	7.110.000,00	80.000,00	98,89
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.500.000,00	1.625.000,00	1.875.000,00	46,43
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	28.000.000,00	26.165.000,00	1.835.000,00	93,45
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	12.000.000,00	4.800.000,00	7.200.000,00	40,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000,00	5.865.000,00	235.000,00	96,15
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer	11.680.000,00	10.950.000,00	730.000,00	93,75

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.822.227.640,00	14.574.136.141,81	248.091.498,19	98,33
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.500.000,00	1.485.000,00	15.000,00	99,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	1.500.000,00	1.485.000,00	15.000,00	99,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	1.500.000,00	1.485.000,00	15.000,00	99,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	21.360.800,00	21.337.800,00	23.000,00	99,88
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	7.360.800,00	7.359.000,00	1.800,00	99,98
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.360.800,00	7.359.000,00	1.800,00	99,98
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	7.986.000,00	14.000,00	99,83
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.000.000,00	7.986.000,00	14.000,00	99,83
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.000.000,00	5.992.800,00	7.200,00	99,88
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	6.000.000,00	5.992.800,00	7.200,00	99,88
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	59.366.840,00	50.451.000,00	8.915.840,00	84,98
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	43.811.000,00	34.936.000,00	8.875.000,00	79,74
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	43.811.000,00	34.936.000,00	8.875.000,00	79,74
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	15.555.840,00	15.515.000,00	40.840,00	99,74
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	9.555.840,00	9.520.000,00	35.840,00	99,62
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.000.000,00	5.995.000,00	5.000,00	99,92
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	14.740.000.000,00	14.500.862.341,81	239.137.658,19	98,38
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	14.740.000.000,00	14.500.862.341,81	239.137.658,19	98,38
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	14.740.000.000,00	14.500.862.341,81	239.137.658,19	98,38
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.140.000.000,00	10.641.105.952,84	498.894.047,16	95,52
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	11.140.000.000,00	10.641.105.952,84	498.894.047,16	95,52
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	11.140.000.000,00	10.641.105.952,84	498.894.047,16	95,52
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	500.000.000,00	299.732.000,00	200.268.000,00	59,95
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	4.800.000.000,00	4.688.938.952,84	111.061.047,16	97,69
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.000.000.000,00	2.873.794.000,00	126.206.000,00	95,79
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.440.000.000,00	2.392.909.000,00	47.091.000,00	98,07
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	400.000.000,00	385.732.000,00	14.268.000,00	96,43
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.900.000.000,00	50.254.877.560,21	2.645.122.439,79	95,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	51.750.000.000,00	49.199.875.494,32	2.550.124.505,68	95,07
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	44.500.000.000,00	42.806.041.253,62	1.693.958.746,38	96,19
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	800.000.000,00	764.800.171,29	35.199.828,71	95,60
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	12.700.000.000,00	11.447.151.412,72	1.252.848.587,28	90,14
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	31.000.000.000,00	30.594.089.669,61	405.910.330,39	98,69
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	7.250.000.000,00	6.393.834.240,70	856.165.759,30	88,19
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	1.150.000.000,00	1.130.924.008,26	19.075.991,74	98,34
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	6.100.000.000,00	5.262.910.232,44	837.089.767,56	86,28
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.050.000.000,00	955.066.065,89	94.933.934,11	90,96
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	500.000.000,00	459.324.015,87	40.675.984,13	91,86
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	200.000.000,00	199.585.000,00	415.000,00	99,79
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	300.000.000,00	259.739.015,87	40.260.984,13	86,58
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	550.000.000,00	495.742.050,02	54.257.949,98	90,13
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	550.000.000,00	495.742.050,02	54.257.949,98	90,13
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	100.000.000,00	99.936.000,00	64.000,00	99,94